



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



TAHUN 2024

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban formal pengguna anggaran sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

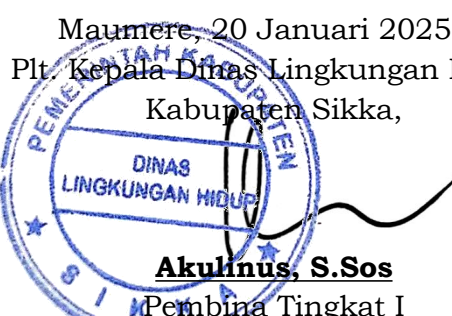
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target kinerja 3 tahun yang direncanakan sesuai dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (DPPMD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu dari pemerintah daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2023, dengan demikian wajib merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai bentuk dari tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.

Tahun 2023 pemerintah Kabupaten Sikka melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Sikka untuk periode tahun 2024-2026 yang diikuti dengan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka.

Maumere, 20 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Akulinus, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat gambaran atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka selama tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Visi Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Sikka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan dengan dukungan jaringan bisnis internasional, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas dengan dukungan teknologi mutakhir, serta pariwisata berbasis budaya dengan jaringan pemasaran global, berwawasan lingkungan di kawasan Flores pada tahun 2025”. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui sembilan Misi Kabupaten Sikka, dan dalam mewujudkan visi dan misi ini kemudian ditetapkan dalam 4 tujuan pembangunan dengan 4 indikator kinerja tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 18 sasaran pembangunan daerah dengan 26 indikator sasaran. Selanjutnya ditetapkan 76 strategi dan 45 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Dari hasil telaah terhadap RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka adalah (1) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan (2) Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator tujuan indeks kualitas pelayanan publik dan (3) Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator tujuan SAKIP.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2024 terdiri dari 3 tujuan dan 3 sasaran strategi dan 8 indikator kinerja tujuan dan sasaran, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

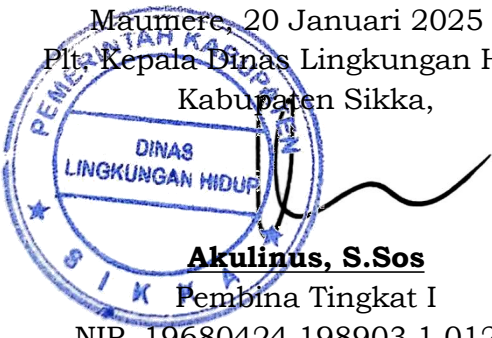
o Tujuan 1 terdapat 3 sasaran strategi dan 9 indikator kinerja sasaran :

- ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (1) realisasi 72,82 atau **melampaui target 70,11.**
- ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (2) realisasi 53,33 atau **melampaui target 51,00.**
- ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (3) realisasi 93,72 atau **melampaui target 93,39.**

- ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (4) realisasi 67,60 atau **melampaui target 66,97.**
- ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (5) realisasi 51,11% atau **tidak mencapai target 79,79%.**
- ✓ Capaian sasaran strategi (2), indikator kinerja (1) realisasi 1,40 atau **tidak mencapai target 1,41.**
- ✓ Capaian sasaran strategi (2), indikator kinerja (2) realisasi 76,25 atau **melampaui target 74,05.**
- ✓ Capaian sasaran strategi (2), indikator kinerja (3) realisasi 0,32 atau **tidak mencapai target 0,35.**
- ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (1) realisasi 0 atau **belum mencapai target 65,59.**

Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Tahun 2024 merupakan tahun transisi yang mana periode perencanaan 5 tahun telah berakhir sehingga dalam penyusunan perencanaan menggunakan dokumen perencanaan tahun 2024-2026. Pelaksanaan kegiatan tahun 2024 cukup optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.13.123.498.975,66** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp.9.271.543.958,86** dan Belanja Modal sebesar **Rp3.851.955.016,80**. Pada akhir Tahun Anggaran 2024, total realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka adalah sebesar **Rp.12.319.883.718** atau sebesar **93,88%**.

Maumere, 20 Januari 2025
 Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Sikka,

Akulinus, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680424 198903 1 012

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	3
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	10
E. Sistematika Penyajian.....	13
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja.....	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B. Realisasi Anggaran.....	41
Bab IV Penutup.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
Lampiran	

Daftar Tabel

No.	Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel 1.1	Status Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Jenis Kelamin	7
2.	Tabel 1.2	Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
3.	Tabel 1.3	Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Pangkat dan Golongan	8
4.	Tabel 1.4	Data Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Berdasarkan Pejabat Struktural per-31 Desember 2024	9
5.	Tabel 1.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2024	9
6.	Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 – 2026	15
7.	Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024	17
8.	Tabel 2.3	Target Tahunan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026	20
9.	Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024	21
10.	Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	31
11.	Tabel 3.2	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Tahun 2023	34
12.	Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah - Renstra DLH	36
13.	Tabel 3.4	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	40
14.	Tabel 3.5	Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	41
15.	Tabel 3.6	Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024	42
16.	Tabel 3.7	Pengujian Kualitas Air dengan 8 Parameter	49

Daftar Tabel

No.	Tabel	Judul Tabel	Hal.
17.	Tabel 3.8	Perhitungan Indeks Kualitas Air	49
18.	Tabel 3.9	Pengujian Kualitas Udara dengan 2 Parameter	50
19.	Tabel 3.10	Perhitungan Indeks Kualitas Udara	50
20.	Tabel 3.11	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Dilakukan Pengawasan	56
21.	Tabel 3.12	Data Volume Sampah dan Jumlah Pengangkutan Sampah Tahun 2024	65

Daftar Gambar

No.	Gambar	Judul Gambar	Hal.
1.	Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	6
2.	Gambar 1.2	Rincian Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	6

Daftar Lampiran

No	Jenis Lampiran
1.	Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
2.	Perubahan Pohon Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
3.	Perubahan Cascading Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
4.	Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
5.	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
6.	Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
7.	Realisasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
8.	Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
9.	Daftar Nama Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
10.	Inventarisasi Dokumen RPPLH SPPL dan UKL/UPL tahun 2024
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024
12.	Daftar Taman Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Maumere Tahun 2024
13.	Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Sanksi Administratif Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024
14.	Profil Kegiatan Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2024
15.	Pelaksanaan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2024
16.	Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diharapkan dapat :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.

1.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup yaitu membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.



1.2 Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana program daerah;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- f. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah;
- g. Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam wilayah daerah;
- h. Perumusan kebijakan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- k. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di daerah;
- l. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
- m. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
- n. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah;



- o. Pengelolaan sampah;
- p. Rekomendasi penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta;
- r. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.3 Tata Kerja

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 tahun 2021, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya”

Selanjutnya dalam pasal 16 menjelaskan :

- a. Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- e. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

2. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sesuai tugas pokok dan fungsi mengemban dan berkontribusi pada pencapaian dua misi pembangunan Kabupaten



Sikka. Hakikatnya pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian dan berkelanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berdasarkan tata ruang dengan kondisi yang mantap.

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan baik perorangan maupun badan hukum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dilakukan agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Sikka untuk melaksanakan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah memiliki permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap berupaya menjaga kelestarian dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Berikut beberapa masalah pokok yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- 1) Masih Rendahnya Layanan Persampahan, disebabkan oleh beberapa masalah berikut:
 - Rendahnya pengelolaan sampah
 - Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan
 - Belum tersedianya peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang penanganan limbah B3
- 2) Lemahnya Perencanaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup, disebabkan oleh beberapa masalah berikut:
 - Belum adanya dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan dokumen lingkungan lainnya
 - Belum maksimalnya upaya konservasi dan Pengelolaan RTH
- 3) Masih Adanya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan , disebabkan oleh beberapa masalah berikut:
 - Belum adanya dokumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup
 - Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan
 - Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan
- 4) Rendahnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH), disebabkan oleh beberapa masalah berikut:
 - Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan maupun terhadap yang belum memiliki ijin lingkungan



- Belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap PPPLH
- Belum adanya penyusunan kebijakan keberadaan MHA terkait PPPLH
- Rendahnya peran masyarakat terhadap PPPLH

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, jangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka didasarkan pada beberapa aspek yaitu permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup, gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dan kesesuaian dengan isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026. Adapun isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu:

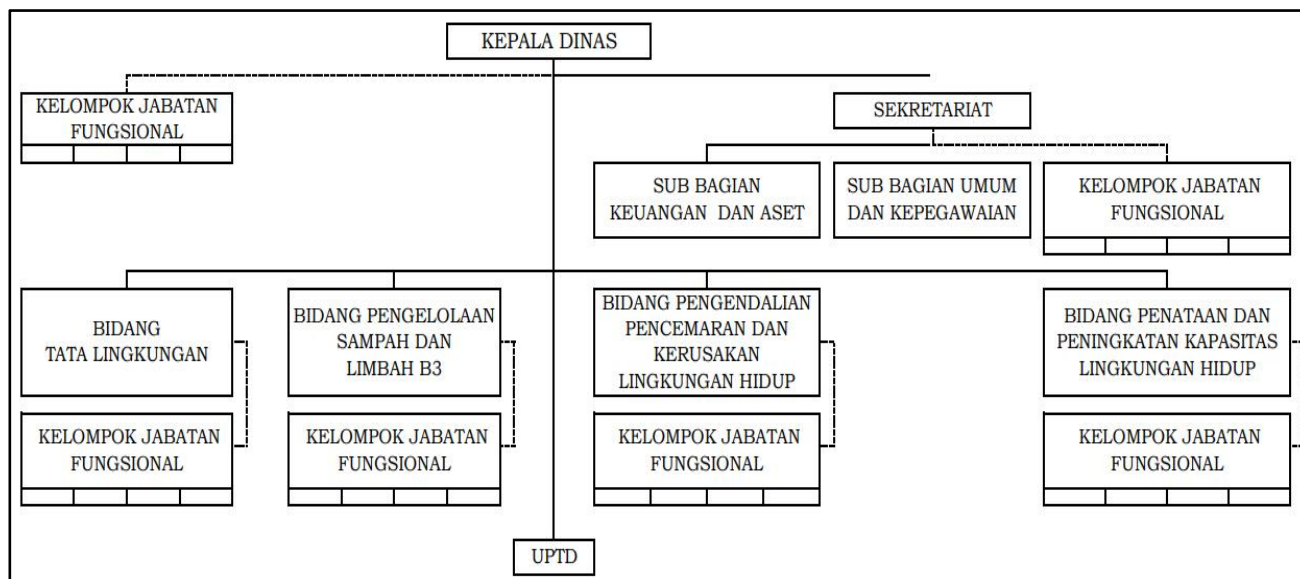
“Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup”

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada gambar berikut:

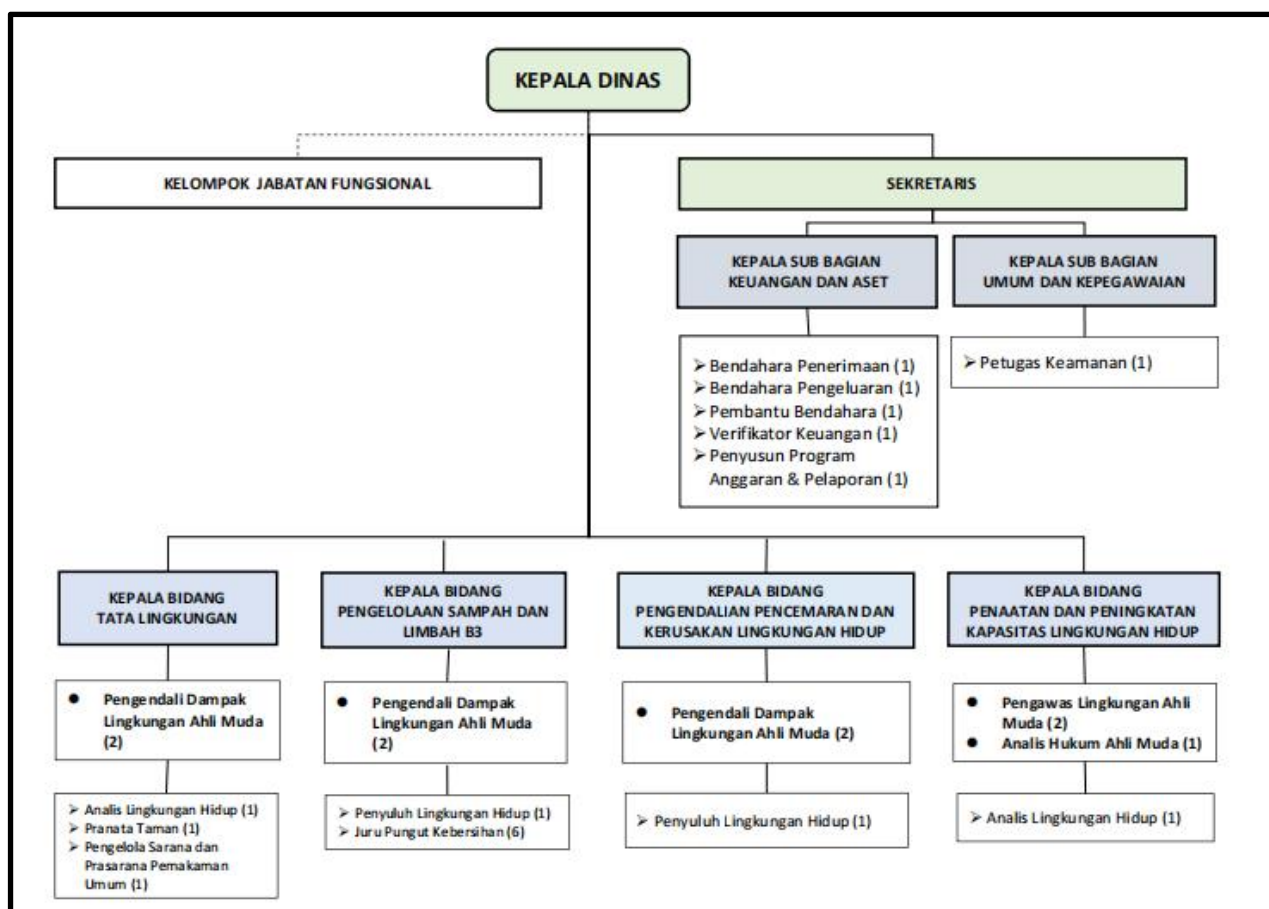


Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka



Sumber : Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2021

Gambar 1.2
Rincian Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka



Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024



A) Sumber Daya Manusia

Penggunaan sumber daya yang dilibatkan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan tahun 2023 terdiri dari sumber daya manusia lingkungan hidup dan sumber daya manusia yang melekat dengan tugas pokok dan fungsi yaitu sekretariat, bidang-bidang teknis dan seksi-seksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Nama Aparat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak dapat dilihat pada *Lampiran 8 dan Lampiran 9*.

Perinciannya dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Status Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Sikka Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	22	12	34
2.	Pegawai Non-ASN :			
	• Tenaga Administrasi Pengelola Sampah	1	-	1
	• Tenaga Administrasi Keuangan	-	1	1
	• Tenaga Administrasi Kepegawaian	-	1	1
	• Tenaga Administrasi Umum	1	-	1
	• Tenaga Laboratorium	1	-	1
	• Pengemudi Mobil Operasional Dinas	1	-	1
	• Juru Tagih Retribusi Sampah	5	5	10
	• Petugas Pengangkut Sampah	72	-	72
	• Petugas Penyapu Jalan	19	12	31
	• Penjaga TPA	1	-	1
	• Pengelola Taman	8	-	8
	• Pengelola Makam	2	-	2
	• Petugas Mobil Tanki	1	-	1
	Jumlah Pegawai Non-ASN	112	19	131
	Total Pegawai	134	31	165

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Sikka Tahun 2024

Adapun rincian nama dan jabatan pegawai ASN dan Non-ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dapat dilihat pada *Lampiran 1 dan Lampiran 2*.



b. Kualitas Pendidikan

Tabel 1.2
Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (org)
1	Sarjana – S2	2
2	Sarjana - S1	18
3	Diploma III	1
4	SMA/SMK/SMEA	5
5	SMP	6
6	SD	2
Jumlah		34

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Sikka Tahun 2024

c. Pangkat dan Golongan

Tabel 1.3
Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan / Ruang	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	4
4	Penata Tingkat I	III/d	9
5	Penata	III/c	1
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
7	Penata Muda	III/a	3
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9	Pengatur	II/c	3
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3
11	Pengatur Muda	II/a	3
12	Juru Tingkat I	I/d	1
Jumlah			34

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Sikka Tahun 2024



d. Jumlah Pejabat Struktural

Tabel 1.4
Data Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Berdasarkan Pejabat Struktural per-31 Desember 2024

No.	Jabatan	Jumlah (org)	Jenis Kelamin		Ket.
			L	P	
Pegawai Negeri Sipil		34	22	12	
1.	Jabatan Administrasi				
	➤ Administrator	5	5	-	
	➤ Pengawas	1	-	1	
	➤ Pelaksana	18	13	5	
2.	Jabatan Fungsional				
	➤ Pengendalian Dampak Lingkungan	6	3	3	
	➤ Pengawas Lingkungan Hidup	2	-	2	
	➤ Analis Hukum	1	-	1	
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi				
	➤ Pimpinan Tinggi Pratama	1	1	-	
Jumlah Pegawai Negeri Sipil		34	22	12	
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		0	0	0	
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA		34	22	12	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (2024)

4.4. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kantor yang pengadaan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1.5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Laptop	Acer	Campuran	Unit	4	Baik	
2.	Printer	Canon iP2700	Campuran	Unit	1	Baik	
3.	Mesin Potong Rumput	Honda	Campuran	Unit	3	Baik	
4.	Mobil Amroll Sampah	Mitsubishi	Campuran	Unit	2	Baik	
5.	Dump Truck Sampah	Mitsubishi	Campuran	Unit	2	Baik	
	Container Sampah	-	Besi	Unit	7	Baik	

Sumber: Data dari Bendahara Barang Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024



4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka menyusun program dan kegiatan strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan:
 - a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sikka, dengan sub kegiatan:
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD
- 3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan:
 - a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**, dengan kegiatan:
 - a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Konservasi Daerah Mata Air dan DAS)
- 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3**, dengan kegiatan :
 - a) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbun
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, dengan kegiatan :
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/



Kota, dengan sub kegiatan:

- a. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :

- a) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Penerapan Sanksi Administrasi Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

9) Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan:

- a) Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - c. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - d. Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.



5. Sistematika Penyajian

Adapun Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Bab I Pendahuluan

- A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Struktur Organisasi
- D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran

- 1. Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Perangkat Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024
- 2. Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 3. Perubahan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2024
- 4. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024
- 5. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2024
- 6. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 7. Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan Perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dan mungkin akan timbul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja dengan berorientasi hasil yang akan dicapai dalam tiga tahun ke depan sebagaimana terintegrasi dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2023.

1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yaitu:



‘ Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup’

Untuk pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup tersebut, ditetapkan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu :

‘ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup’

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	70,11	71,70	73,81
			IKA : Indeks Kualitas Air	51,00	52,53	54,63
			IKU : Indeks Kualitas Udara,	93,39	94,51	95,74
			IKL : Indeks Kualitas Lahan	66,97	68,98	71,74
			Persentase penanganan sampah perkotaan	79,49	81,08	83,51
		Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,41	1,45	1,51
			Indeks Profesionalisme ASN	76,05	78,33	81,47
			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,35	0,36	0,37
		Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	SAKIP	65,94	67,92	70,64

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026 adalah Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Kabupaten Sikka.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisisi terhadap gambaran



pelayanan ,isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui factor-kaftor keberhasilan dan tidak keberhasilan tersebut dapat disusun strategi dan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka tahun 2024-2026 maka dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Memanfaatkan Perda untuk meningkatkan komitmen pemerintah dan partisipasi stakeholder dalam PPPLH.
2. Memanfaatkan SOP dan teknologi informasi untuk menyediakan database lingkungan guna mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal dan mengurangi degradasi lingkungan serta perubahan iklim.
3. Meningkatkan komitmen pemerintahan, dukungan dana APBN dan partisipasi stakeholder untuk penyediaan sarpras pengelolaan sampah, RTH, laboratorium dan tenaga laboratorium serta mengoptimalkan SDM pengelola persampahan dan RTH guna mendukung PPPLH.
1. Menyusun Jakstrada pengelolaan sampah, Perda tentang pemakaman, Standar baku mutu lingkungan daerah, kebijakan daerah terkait tata kelola TPS Limbah B3, RPPLH dan komitmen pemerintahan serta partisipasi stakeholder untuk pengelolaan lingkungan dan mengurangi degradasi lingkungan.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dengan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dalam PPPLH untuk mengurangi pemanfaatan SDA secara ilegal guna mengurangi degradasi lingkungan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung SDM pengelolaan persampahan, RTH dan penyediaan sarpras TPST dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mengurangi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada Tahun 2024. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Kabupaten Sikka dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024

N o	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Formulasi Hitungan	Satuan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung jawab	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 IKA) + (0,405 IKU) + (0,219 IKL)	Indeks	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	APBD
			Indeks Kualitas Air	Parameter yang diukur adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, E.Coli, Total Coliform $PIj = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ Pij adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C _i /L _{ij} , dimana C _i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan L _{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j Evaluasi terhadap Pij adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤ Pij ≤ 1,0 2. Tercemar ringan jika 1,0 < Pij ≤ 5,0 3. Tercemar sedang jika 5,0 < Pij ≤ 10,0 4. Tercemar berat jika Pij > 10,0		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Tata Lingkungan	APBD
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Persentase Dokumen pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Bidang Tata Lingkungan	APBD
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
						Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	APBD
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Bidang Tata Lingkungan	APBD
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka	Persentase Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Bidang Tata Lingkungan	APBD
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
						Indeks	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	Bidang Persampahan



				Kualitas Udara	Nilai Pij > 1 menurut mutu air kelas II = tidak memenuhi BM)		Kabupaten/Kota		dan Limbah B3	
				Indeks Kualitas Lahan	Parameter yang diukur adalah SO ₂ dan NO ₂ $IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IP _{NO₂} = Indeks Pencemar NO ₂ IP _{SO₂} = Indeks Pencemar SO ₂ Untuk menghitung Indeks tutupan lahan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap Prov/Kab/Kota Nilai Indeks didapatkan dengan formula : $ITH = \frac{LTH}{LWP}$ dimana: ITH = Indeks Tutupan Lahan LTH = Luas Tutupan ber-Hutan LKH = Luas Wilayah Provinsi		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD		
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD		
					Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD		
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	APBD		
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas HL	APBD		
			Perse ntase	Persentase Penangana n sampah Perkotaan	<u>Volume sampah yang terangkut</u> Volume sampah yang dihasilkan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
							Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD



						Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	Bidang Persampahan dan Limbah B3	APBD
Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik			Indeks Kualitas Pelayanan PublikDLH		Indeks	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaraan Tugas dan Fungsi DLH	Sekretariat	APBD
			Indeks Profesionalisme ASN	$IPP = (25 \times 1 - A) + (25 \times (1 - B)) + (25 \times C) / 100 + (25 \times (1 - D))$	Indeks	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	APBD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	APBD
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan	Sekretariat	APBD
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	APBD
			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Total Nilai Indikator Sarpras}}{\text{Banyaknya Indikator Sarpras}}$	Indeks	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat	APBD
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada DLH		
Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran DLH			Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendukung Kelancaraan Tugas dan Fungsi DLH	Sekretariat	APBD



Tabel 2.3

Target Tahunan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan dan Sasaran Renstra	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :	Indeks	75,44	70,11	71,70	73,81	73,81
			IKA : Indeks Kualitas Air	Indeks	60,00	51,00	52,53	54,63	54,63
			IKU : Indeks Kualitas Udara,	Indeks	93,30	93,39	94,51	95,74	95,74
			IKL : Indeks Kualitas Lahan	Indeks	68,91	66,97	68,98	71,74	71,74
			Persentase penanganan sampah perkotaan	Persentase	55,43	79,49	81,08	83,51	83,51
		Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	1,38	1,41	1,45	1,51	1,51
			Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	74,56	76,05	78,33	81,47	81,47
			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
		Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	SAKIP	Nilai	67,45	65,94	67,92	70,64	70,64



C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	70,11
			Indeks Kualitas Air	Indeks	51,00
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,39
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks	66,97
			Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	Persentase	79,49
.		Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	1,41
		a.Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	76,05
		b.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks sarana dan Prasarana pada DLH	Indeks	0,35
		Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	SAKIP	Nilai	65,94

D. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

1. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan



demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja

- a. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja. Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri pemerintah provinsi/kabupaten/kota disusun oleh pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh gubernur/bupati/ walikota dan pimpinan SKPD/unit kerja.

- b. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

- c. Penggunaan sasaran dan indikator

Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

- Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.



- Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama ESE II dan indikator kinerja lain yang relevan.



4. Format Perjanjian Kinerja

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

- Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
- Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
(terlampir)

b. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut: (terlampir)

c. Bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

5. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

6. Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja 2024

Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKULINUS, S.Sos.**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE., M.Si.**

Jabatan : Penjabat Bupati Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 9 Oktober 2024

Pihak Kedua
Penjabat Bupati Sikka,

ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE., M.Si.

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

AKULINUS, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,11
		<i>a. Indeks Kualitas Air</i>	51,00
		<i>b. Indeks Kualitas Udara</i>	93,39
		<i>c. Indeks Tutupan Lahan</i>	66,97
		Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	79,49
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,41
		Indeks Profesionalisme ASN	76,05
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,35
3	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	65,94

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(4)	(5)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.380.447.108,86	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	711.261.220,00	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	166.429.310,00	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	609.032.586,80	APBD



5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	24.690.000,00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.600.310,00	APBD
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	159.998.900,00	APBD
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	94.991.520,00	APBD
8	Program Pengelolaan Persampahan	7.892.048.020,00	APBD
TOTAL		13.123.498.975,66	APBD

Jumlah Anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis :
Rp13.123.498.975,66

Maumere, 9 Oktober 2024

Pihak Kedua
Penjabat Bupati Sikka,

ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE., M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

AKULYNUS, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup = - Indeks Kualitas Air 42,50 - Indeks Kualitas Udara 83,50 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan 57,20	61,07 =	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	711.261.220
				Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	166.429.310
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	609.032.586,80
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	24.690.000
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.600.310
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	159.998.900
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	94.991.520
2	Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Pananganan Sampah Perkotaan	67,59	Program Pengolahan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang tertangani	7.892.048.020
3.	a.Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	3.380.447.108,86
	b.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada DLH	0,70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	
4.	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP	70,15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	
TOTAL ANGGARAN						13.123.498.975,66


 Pihak Pertama
 Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Sikka,
AKULINUS, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680424 198903 1 012



Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,11	72,82	103,87	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	711.261.220,00	711.110.580,00	99,98
		IKA : Indeks Kualitas Air	51,00	53,33	104,57	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	609.032.586,80	584.322.579,00	95,94
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	166.429.310,00	152.298.970,00	91,51
		IKU : Indeks Kualitas Udara	93,39	93,72	100,35	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.600.310,00	71.906.700,00	85,00
		IKL : Indeks Kualitas Lahan	66,97	67,6	100,94	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	159.998.900,00	157.769.320,00	98,61
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	94.991.520,00	61.146.520,00	64,37
		Persentase penanganan sampah perkotaan	79,49	51,11	64,30	Program Pengelolaan Persampahan	7.892.048.020,00	7.353.898.383,00	93,18
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3	24.690.000,00	24.378.800,00	98,74



2	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,41	1,4	99,29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.380.447.108,86	3.203.051.866,00	94,75
		Indeks Profesionalitas ASN	76,05	76,25	100,26				
		Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	0,35	0,32	91,43				
3	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai SAKIP	65,94	-	0				

Jumlah Anggaran 2024 : Rp. **13.123.498.975,66**

Realisasi Pagu Tahun 2024 : Rp. **12.319.883.718,00**

Matumere, 20 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

AKULINUS, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2024 yang memuat realisasi dan capaian kinerja atas target kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam bab ini disajikan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2024.

Dalam melakukan penilaian terhadap Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, mengacu pada peraturan.

A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka. Disamping itu capaian kinerja organisasi dilakukan untuk melihat setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



1. Perbandingan antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 IKA) + (0,405 IKU) + (0,219 IKL)	Indeks	73,81	70,11	72,82	103,87
		Indeks Kualitas Air	Parameter yang diukur adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Phosphat, E.Coli, Total Coliform $PIj = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ Pij adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij}, dimana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j Evaluasi terhadap Pij adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq Pij \leq 1,0$ 2. Tercemar ringan jika $1,0 < Pij \leq 5,0$ 3. Tercemar sedang jika $5,0 < Pij \leq 10,0$ 4. Tercemar berat jika $Pij > 10,0$ Nilai Pij > 1 menurut mutu air kelas II = tidak memenuhi BM)	Indeks	54,63	51,00	53,33	104,57
		Indeks Kualitas Udara	Parameter yang diukur adalah SO ₂ dan NO ₂ $IPU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$ dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IP_{NO2} = Indeks Pencemar NO₂ IP_{SO2} = Indeks Pencemar SO₂	Indeks	95,74	93,39	93,72	100,35



		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Untuk menghitung Indeks tutupan lahan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap Prov/Kab/Kota Nilai Indeks didapatkan dengan formula : $ITH = \frac{LTH}{LWP}$ dimana: ITH = Indeks Tutupan Lahan LTH = Luas Tutupan ber-Hutan LKH = Luas Wilayah Provinsi	Indeks	71,74	66,97	67,60	100,34
		Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	$\frac{\text{Volume sampah yang terangkut}}{\text{Volume sampah yang dihasilkan}}$	Persentase	83,51	79,49	51,11	64,30
II	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup		Indeks	1,51	1,41	1,40	99,29
		Indeks Profesionalisme ASN	$IPP = (25 \times 1 - A) + (25 \times (1 - B)) + (25 \times C) / 100 + (25 \times (1 - D))$	Indeks	81,47	74,05	76,25	102,97
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Total Nilai Indikator Sarpras}}{\text{Banyaknya Indikator Sarpras}}$	Indeks	0,37	0,35	0,32	91,43
III	Meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka	Nilai	70,64	65,94	-	-



Berdasarkan data pada Tabel 3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diperoleh indeks sebesar 72,82 dengan capaian kinerja sebesar 103,87 % dan dirincikan sebagai berikut:
 1. Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2024 sebesar 53,33 melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 104,57%.
 2. Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 sebesar 93,72 melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 100,35%.
 3. Indikator Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 sebesar 67,60 melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 100,34%.
 4. Indikator Persentase Penanganan Sampah Perkotaan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 51,11% tidak mencapai target dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 64,30%.
- Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup diperoleh indeks sebesar 1,40 dengan capaian kinerja sebesar 99,29 % dan dirincikan sebagai berikut:
 1. Indikator Indeks Profesionalisme ASN dengan Indikator Indeks Profesional ASN realisasi tahun 2024 sebesar 76,25 melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 102,97%.
 2. Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup realisasi tahun 2024 sebesar 0,32 tidak mencapai target dengan capaian kinerja 91,43%
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dengan sasaran nilai SAKIP belum dapat dicantumkan dalam table 3.1 diatas dan hal ini disebabkan karena pihak Inspektorat Kabupaten Sikka belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran 2024



2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3.2
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1	2	3	4		5	
I	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,44	72,82	123,53%	103,87%
		Indeks Kualitas Air	60,00	53,33	141,18%	104,57%
		Indeks Kualitas Udara	93,30	93,72	111,74%	100,35%
		Indeks Kualitas Lahan	68,91	67,60	120,47%	100,34%
		Persentase Penangan Sampah Perkotaan	55,43	51,11	82,01%	64,30%
II	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,38	1,40	69,00%	99,29%
		Indeks Profesionalisme ASN	74,56	76,25	93,20%	102,97%
		Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	0,34	0,32	48,57%	91,43%
III	Meningkatnya kualitas kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	67,45	-	96,15%	-

Berdasarkan data pada Tabel 3.2. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebesar 72,82 sedangkan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebesar 75,44 atau menurun sebesar 19,66% dari capaian kinerja tahun 2023, dengan rincian sbb :

1. Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2024 sebesar 53,33 sedangkan Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2023 sebesar 60,00 atau menurun sebesar 36,61% dari capaian kinerja tahun 2023.
2. Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 sebesar 93,72 sedangkan Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 sebesar 93,30 menurun sebesar 11,39% dari capaian kinerja tahun 2023.



3. Indikator Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 sebesar 67,60 sedangkan Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023 sebesar 68,91 atau menurun sebesar 20,13% dari capaian kinerja tahun 2023.
 4. Indikator Persentase Penanganan Sampah Perkotaan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 51,11% sedangkan tahun 2023 sebesar 55,43 % atau menurun sebesar 17,7% dari Capaian Kinerja Tahun 2023.
- Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar 1,38 sedangkan Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar 1,40 atau menurun sebesar 30,29% dari capaian kinerja tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:
1. Indikator Indeks Profesionalisme ASN realisasi tahun 2024 sebesar 76,25 sedangkan tahun 2023 sebesar 74,56 atau meningkat sebesar 9,77% dari capaian kinerja tahun 2023.
 2. Indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup realisasi tahun 2024 sebesar 0,32 sedangkan tahun 2023 sebesar 0,34 atau meningkat sebesar 42,86% dari capaian kinerja Tahun 2023.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dengan sasaran nilai SAKIP belum dapat di hitung karena pihak Inspektorat Kabupaten Sikka belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup. Untuk penilaian SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar 65,94 dengan kategori B atau Baik. Perolehan nilai tersebut menggambarkan bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 96,15%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024
dengan Target Jangka Menengah - Renstra DLH

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja 2024	Target Kinerja s/d 2026	Capaian Kinerja
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,82	73,81	98,66%
	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,33	54,63	97,62%
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,72	95,74	97,89%
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	67,60	71,74	94,23%
	Persentase Penangan Sampah Perkotaan	Persentase	51,11	83,51	61,20%
II	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	1,0	1,51	66,23%
	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	76,25	81,47	93,59%
	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	0,32	0,37	86,49%
III	Nilai SAKIP	Nilai	-	70,64	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2024 rata-rata mencapai 86,34%. Atau dengan kata lain target yang ditetapkan dalam kinerja jangka menengah dapat dicapai pada angka 86,34%.

Berdasarkan data pada Tabel 3.3 Analisis Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 72,82 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 73,81 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 98,66% dengan rincian sbb :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dengan Indikator Indeks Kualitas Air pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 53,33 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Indeks Kualitas Air sebesar 54,63 dan capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 97,62%



2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara dengan dengan Indikator Indeks Kualitas Udara Hidup hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 93,72 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Indeks Kualitas Udara sebesar 95,74 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 97,89%.
 3. Sasaran Bertambahnya Tutupan Lahan dengan Indikator Indeks Kualitas Lahan pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 67,60 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Indeks Kualitas Lahan sebesar 71,74 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 94,23%.
 4. Sasaran Meningkatnya Layanan Persampahan dengan Indikator Persentase Penanganan Sampah Perkotaan hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 51,11% sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Persentase Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 83,51% dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 61,20%.
- Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN dengan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 1,40 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup sebesar 1,51 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 92,72% dengan rincian sbb:.
- 1) Sasaran Meningkatnya Indeks profesionalisme ASN hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 76,25 sedangkan target akhir periode Renstra untuk Indikator profesionalisme ASN 81,47 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 93,59%.
 - 2) Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dengan Indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup hasil pencapaian realisasi kinerja 2024 sebesar 0,32 sedangkan target akhir periode Renstra sebesar 0,37 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 86,49%.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dengan sasaran nilai SAKIP hasil pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 belum diketahui karena nilai SAKIP hingga saat laporan ini dibuat belum dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sikka sedangkan target akhir periode Renstra sebesar 70,64 dengan demikian maka capaian kinerja terhadap kondisi akhir Renstra dengan nilai SAKIP belum dapat dilampirkan.



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

● Analisis Keberhasilan Kinerja

Analisis keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, baik kinerja penyerapan anggaran, kinerja capaian target kinerja berbagai program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Analisis Internal

- Adanya struktur organisasi yang jelas dalam implementasi berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024.
- Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas.
- Kinerja penyerapan anggaran Tahun 2024 sebesar 93,88% dan Kinerja capaian target kinerja berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024 sebesar 122,2% hal ini menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik dan optimal dalam penyerapan anggaran Kinerja peaksanaan program dan kegiatan.

2) Analisis Eksternal

- Adanya dukungan dari pelaku utama dan pelaku usaha dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

● Analisis Kegagalan atau Permasalahan

Analisis permasalahan yang menghambat keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka:

- 1) Terdapat banyak sub kegiatan pada salah satu bidang sehingga *schedule* saling bertabrakan.
- 2) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bidang sebagai satu kesatuan tim yang utuh, teristimewa kegiatan monitoring terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan dokumen lingkungan
- 3) Ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap poin – poin pengelolaan lingkungan yang terdapat pada Dokumen Lingkungan



- 4) Kurang adanya koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Wilayah dan Aparat Penegak Hukum dalam kaitan dengan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan
- 5) Koordinasi ke kelompok penghijauan tidak maksimal karena jarak tempuh ke lokasi penangkaran jauh dan sulit
- 6) Kurangnya partisipasi peserta penyuluhan dari kelompok saat penyuluhan
- 7) Terbatasnya informasi mengenai tata cara pengaduan terhadap pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga masih banyak kemungkinan adanya pengaduan lain yang tidak diketahui
- 8) Rendahnya kesadaran masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran PPLH namun tidak melakukan pengaduan
- 9) Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga berpengaruh pada laju timbunan volume sampah yang terus bertambah
- 10) Sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai

● **Solusi yang dilakukan untuk Pencapaian Kinerja**

1. Perlu pembagian jadwal kerja kegiatan yang merata pada setiap bulannya
2. Perlunya terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antar seksi dan bidang-bidang terkait
3. Perlu upaya penegakan hukum yang lebih tegas bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar poin – poin pada Dokumen Lingkungan
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi terkait (DLH, ESDM dll) dengan pemerintah wilayah terkait pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan
5. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait berbagai peraturan perundang-undangan terkait mekanisme dan syarat-syarat pengurusan rekomendasi lingkungan, tata cara pengaduan, pengurangan sampah, penanganan limbah B3 dan penebangan pohon kepada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
6. Perlu dilakukan aksi bersih secara rutin dan kegiatan perlindungan lingkungan terus melibatkan masyarakat setempat dan komunitas peduli lingkungan
7. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penanganan sampah dan Limbah B3.
8. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah.



5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Jumlah Anggaran Tahun 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 13.123.498.975,66 Terealisasi sebesar Rp. 12.319.883.718 dengan presentase sebesar 93,88. Tingginya angka realisasi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah memaksimalkan penggunaan anggaran Tahun 2024 secara baik.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

a. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel 3.4
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program	Kegiatan	Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Untuk menunjang pernyataan kinerja meningkatnya IKLH (IKA, IKU dan IKL)
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Untuk menunjang pernyataan kinerja meningkatnya IKLH (IKA, IKU dan IKL)
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Untuk menunjang pernyataan kinerja meningkatnya IKLH (IKA, IKU dan IKL)
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Untuk menunjang pernyataan kinerja meningkatnya IKLH (IKA, IKU dan IKL)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka	Untuk menunjang pernyataan kinerja meningkatnya IKLH (IKA, IKU dan IKL)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Untuk menunjang pernyataan kinerja meningkatnya IKLH (IKA, IKU dan IKL)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Untuk menunjang pernyataan kinerja meningkatnya IKLH (IKA, IKU dan IKL)



b. Analisis Program/Kegiatan yang menyebabkan kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel 3.5
Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program	Kegiatan	Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja tidak 100% dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pihak kelurahan terkait anggota kelompok pelatihan dari sisi usia tidak layak/produktif; Koordinasi ke kelompok penghijauan tidak maksimal karena jarak tempuh ke lokasi penangkaran jauh dan sulit
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Capaian kinerja tidak 100% dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan disekitarnya serta ketidaktahuan tata cara pengaduan bagi masyarakat.
Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Capaian kinerja tidak 100% dikarenakan keterbatasan waktu untuk melakukan sosialisasi terhadap terkait pengelolaan sampah dan kondisi sarana prasarana pengangkutan sampah sangat tidak memadai.

B. Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Urusan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam Tahun 2024 dijabarkan dalam 9 program, 16 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :



a. Pendapatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka mengelola pendapatan yaitu Penerimaan Retribusi Sampah dengan Pagu Pendapatan sebesar Rp500.000.000,- terealisasi sebesar Rp472.405.700,- atau sebesar 94,4%.

b. Belanja

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 13.123.498.975,558,-** berupa **Belanja Operasi** dan **Belanja Modal**. Dengan komposisi Belanja Operasi **Rp. 9.271.543.956,86,-** atau mencapai **70,65%** yaitu terdiri dari **Belanja Pegawai** (Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pph dan Pembulatan gaji) dan **Belanja Barang dan Jasa**. Sedangkan **Belanja Modal** sebesar **Rp. 3.851.955.016,80,-** atau mencapai **29,35%**.

Dari Total Anggaran tersebut diatas, Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp. 12.319.883.718 atau sebesar 93,88% (Dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
Tahun 2024

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.380.447.108,86	3.203.051.866	177.395.243	94,75%
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.083.040,00	49.875.040	1.208.000	97,64%
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.083.040,00	49.875.040	1.208.000	97,64%
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.356.268,86	2.746.101.586	149.254.683	94,85%
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.839.815.978,86	2.690.577.586	149.238.393	94,74%
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.540.290,00	55.524.000	16.290	99,97%
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.720.540,00	111.610.450	110.090	99,90%
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.321.340,00	19.294.450	26.890	99,86%
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.425.200,00	11.416.000	9.200	99,92%
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.974.000,00	80.900.000	74.000	99,91%
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.421.020,00	36.421.020	0	100,00



2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	427.600,00	427.600	0	100,00
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.993.420,00	35.993.420	0	100,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.704.810,00	163.282.340	16.422.470	90,86%
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.554.570,00	29.691.250	4.863.320	85,93%
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.150.240,00	133.591.090	11.559.150	92,04%
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.161.430,00	95.761.430	10.400.000	90,20%
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.161.430,00	94.761.430	10.400.000	90,11%
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000	0	100%
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	711.261.220,00	711.110.580	150.640	99,98%
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	61.261.680,00	61.190.440	71.240	99,88%
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	19.336.080,00	19.327.000	9.080	99,95%
2.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	41.925.600,00	41.863.440	62.160	99,85%
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	649.999.540,00	649.920.140	79.400	99,99%
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	649.999.540,00	649.920.140	79.400	99,99 %
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	166.429.310,00	152.298.970	14.130.340	91,51%
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	104.030.000,00	99.849.500	4.180.500	95,98%
2.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	104.030.000,00	99.849.500	Rp4.180.500	95,98%
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	62.399.310,00	52.449.470	9.949.840	84,05%
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	62.399.310,00	52.449.470	9.949.840	84,05%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	609.032.586,80	584.322.579	24.710.008	95,94%
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka	609.032.586,80	584.322.579	24.710.008	95,94%
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	609.032.586,80	584.322.579	24.710.008	95,94%
2.11.04.2.01.08	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Konservasi Daerah Mata Air dan DAS)	0	0	0	0%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3	24.690.000,00	24.378.800	311.200	98,74%
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.690.000,00	24.378.800	311.200	98,74%
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbun	24.690.000,00	24.378.800	311.200	98,74%



2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	84.600.310,00	71.906.700	12.693.610	85,00%
2.11.6.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.600.310,00	71.906.700	12.693.610	85,00%
2.11.6.2.01.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	84.600.310,00	71.906.700	Rp12.693.610	85,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	159.998.900,00	157.769.320	2.229.580	98,61%
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.998.900,00	157.769.320	2.229.580	98,61%
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	147.999.250,00	145.769.670	2.229.580	98,49%
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	11.999.650,00	11.999.650	0	100%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	94.991.520,00	61.146.520	33.845.000	64,37%
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	94.991.520,00	61.146.520	33.845.000	64,37%
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	74.991.930,00	50.451.930	24.540.000	67,28%
2.11.10.2.01.06	Penerapan Sanksi Administrasi Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.590,00	10.694.590	9.305.000	53,47%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.892.048.020,00	7.353.898.383	538.149.637	93,18
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	7.892.048.020,00	7.353.898.383	538.149.637	93,18
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	25.148.410,00	25.058.410	Rp90.000	99,64
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.611.906.000,00	3.076.593.000	535.313.000	85,18 %
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	156.867.160,00	155.571.960	1.295.200	99,17%
2.11.11.2.01.0017	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	4.098.126.450,00	4.096.675.013	1.451.437	99,96%
TOTAL		13.123.498.975,66	12.319.883.718	803.615.258	93,88%

Sumber : Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2024



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp.3.380.447.108,66,- realisasi Rp.3.203.051.866,- atau 94,75%, dengan kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.51.083.040,- realisasi Rp.49.875.040,- atau 97,64%, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp.51.083.040,- realisasi Rp.49.875.040,- atau 97,64%.
Dana ini digunakan untuk Penyusunan Laporan (LPPD, LKPJ, LAKIP, PK, SAKIP, Renja SKPD, Laporan Belanja Langsung, Laporan Keuangan), sebanyak 8 dokumen dan uang lembur.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.2.895.356.268,86,- realisasi Rp.2.746.101.586,- atau 94,85%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, alokasi anggaran sebesar Rp.2.839.815.978,86,- realisasi Rp.2.690.577.586,- atau 94,74%.
Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN sebanyak 35 orang, selama 14 bulan, namun berkurang 2 orang ASN yang pensiun pada bulan Juli dan November.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 55.540.290,- realisasi Rp. 55.524.000,- atau 99,97%.
Digunakan untuk belanja honorarium dan lembur Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan belanja bahan kegiatan Kantor Benda Pos (Materai 10.000).
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.111.720.540,- realisasi Rp.111.610.450,- atau 99,90%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan, alokasi anggaran sebesar Rp.19.321.340,- realisasi Rp.19.294.450,- atau 99,86%.
Digunakan untuk belanja Kantor ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos (Materai 10.000) dan Bahan Komputer.



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi anggaran sebesar Rp.11.425.200,- realisasi Rp.11.416.000,- atau 99,92%.
Digunakan untuk belanja bahan cetak berupa penggandaan naskah dinas dan penjilidan dokumen dinas.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp.80.974.000,- realisasi Rp.80.900.000,- atau 99,91%.
Digunakan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kupang 2 kali dan Bali 3 kali serta dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp.36.421.020,- realisasi Rp.36.421.020,- atau 100%, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp.427.600,- realisasi Rp.427.600,- atau 100%.
Digunakan untuk belanja penggandaan. Pada mulanya sub kegiatan ini dialokasikan anggaran untuk pengadaan mesin potong rumput sejumlah 4 unit, namun kemudian digeser ke program lain.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp.35.993.420,- realisasi Rp.35.993.420,- atau 100%.
Digunakan untuk belanja 2 unit laptop untuk sekretariat, 1 unit laptop untuk Bidang Persampahan dan Limbah B3, 1 unit laptop dan 1 unit printer untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.179.704.810,- realisasi Rp.163.282.340,- atau 90,86%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, alokasi anggaran sebesar Rp.34.554.570,- realisasi Rp.29.691.250 atau 85,93%.
Digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air, listrik dan Internet (Wi-fi) kantor, selama 12 bulan.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, alokasi anggaran sebesar Rp.145.150.240,- realisasi Rp.133.591.090,- atau 92,04%.
Digunakan untuk membayar jasa tenaga pelayanan umum, iuran jaminan



kesehatan bagi non ASN, Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN dan iuran jaminan kematian bagi non ASN untuk 5 orang tenaga honor di sekretariat. Selain itu juga digunakan untuk belanja makanan minuman rapat dan perabot kantor.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.106.161.430,- realisasi Rp.95.761.430,- atau 90,20%, dengan sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi anggaran sebesar Rp.105.161.430,- realisasi Rp.94.761.430,- atau 90,11%.

Digunakan untuk bahan bakar dan pelumas, suku cadang, tunjangan sopir sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang operator alat berat, 10 (sepuluh) orang sopir dum truck, 4 (empat) orang sopir amroll, 1 (satu) orang sopir mobil tangki air, 1 (satu) orang sopir kendaraan kepala dinas. selain itu juga pajak kendaraan dinas/operasional sebanyak 17 (tujuh belas) unit terdiri dari kendaraan bermotor roda dua sebanyak 5 (lima) unit, kendaraan bermotor roda empat sebanyak 2 (dua) unit dan pajak kendaraan roda empat (dumb truck - amroll) sebanyak 10 (sepuluh) unit dan servis kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) kali.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- realisasi Rp.1.000.000,- atau 100%.

Digunakan untuk Belanja Pemeliharaan Komputer berupa service 4 (empat) unit laptop.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran sebesar Rp.711.261.220,- realisasi Rp.711.110.580,- atau 99,98%, dengan kegiatan:

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.61.261.680,- realisasi Rp.61.190.440,- atau 99,88%, dengan sub kegiatan:

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.19.336.080,- realisasi Rp.19.327.000,- atau 99,95%.

Dana ini digunakan untuk mendapatkan Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota melalui rangkaian kegiatan yang bermuara pada diterbitkannya 65 dokumen



lingkungan yang terdiri dari: rekomendasi terhadap 64 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan 1 dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Rincian data Inventarisasi Dokumen RPPLH SPPL dan UKL/UPL sepanjang tahun 2024 termuat dalam *Lampiran 10*.

- Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.41.925.600,- realisasi Rp.41.863.440,- atau 99,85%.

Dana ini digunakan untuk mengakomodir arahan RPPLH Provinsi sehingga oleh Bidang Tata Lingkungan telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Konsultasi Penyusunan dan Penetapan RPPLH di Bali dan Kupang.

- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.649.999.540,- realisasi Rp.649.920.140,- atau 99,99%, dengan sub kegiatan:

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD, alokasi anggaran sebesar Rp.649.999.540,- realisasi Rp.649.920.140,- atau 99,99%.

Dana ini digunakan untuk penyusunan dan validasi dokumen Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kabupaten Sikka 2025 – 2045 dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Sikka 2025 – 2030 terlaksana sejak Oktober 2023 dan dilanjutkan hingga awal April 2024.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran sebesar Rp.104.030.000,- realisasi Rp.99.849.500,- atau 91,51%, dengan kegiatan:

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, alokasi anggaran sebesar Rp.104.030.000,- realisasi Rp.99.849.500,- atau 95,98%, dengan sub kegiatan:

- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.104.030.000,- realisasi Rp.99.849.500,- atau 95,98%.

Dana ini digunakan untuk melakukan pemantauan kualitas air. Untuk pemantauan kualitas air dilakukan pengambilan sampel air dalam daerah (Sungai Wairita) sebanyak 3 (tiga) titik di 1 (satu) lokasi dan pengambilan Sampel air dalam daerah (Sungai kaliwajo) sebanyak 3 (tiga) titik di (satu)



lokasi yaitu pada musim kemarau dan musim hujan agar hasil pengujiannya dapat diambil nilai rata – ratanya untuk menghitung nilai indeks Kualitas Air (IKA). Setelah pengambilan sampel air selanjutnya diantar ke UPTD. Laboratorium Lingkungan Provinsi untuk dilakukan pengujian kualitas air. Pengujian kualitas air yang dilakukan, menggunakan parameter sesuai standar perhitungan IKLH dalam rangka perhitungan indeks kualitas air (IKA), yang menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dan IKLH Nasional (Berdasarkan Surat Gubernur NTT Nomor BU.660/24/DLHK/2021, tanggal 1 November 2021, perihal Perhitungan IKLH)

Dari hasil kualitas air diperoleh nilai hasil sebesar 53.33 yang masuk kategori **sedang** ($50 \leq x < 70$). Dari hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pengujian Kualitas Air dengan 8 Parameter

N O	TANGGAL PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	NILAI PEMANTAUAN							
			pH (Potential Hydrogen)	BOD (mg/L) (Biological Oxygen Demand)	COD (mg/L) (Chemical Oxygen Demand)	TSS (mg/L) (Total Suspended Solid)	DO (mg/L) (Dissolved Oxygen)	NO ₃ ⁻ (mg/L) (Nitrat)	TOTAL FOSFAT mg/L	FECAL COLIFORM mg/L
1	'19 Oktober 2024	2	6.44	'5.8	'6.99	'37	'5.41	'0.219	'0.38	'930
2	'19 Oktober 2024	2	6.42	'5.44	'8.58	'10	'5.2	'0.213	'0.36	'680
3	'19 Oktober 2024	2	6.49	'5.08	'6.76	'16	'4.8	'0.219	'0.35	'780
4	'17 Februari 2024	1	6.47	'4.35	'5.89	'8	'5.26	'0.01	'0.018	'1300
5	'17 Februari 2024	1	7.44	'1.81	'3	'13	'4.08	'0.01	'0.027	'450
6	'17 Februari 2024	1	7.74	'1.99	'3	'9	'4.17	'0.01	'0.28	'780

Sumber : Aplikasi IKLH Tahun 2024

Tabel 3.8
Perhitungan Indeks Kualitas Air

Kabupaten/ Kota	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA
	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	
Kabupaten Sikka	1	5	0	0	11.67	41.67	0,00	0,00	53.33

Sumber : Aplikasi IKLH Tahun 2024



Pemantauan kualitas udara dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali pada 4 (empat) lokasi/titik dengan 2 (dua) kali pengulangan setelah pemasangan alat selama 14 (empat belas) hari, dilanjutkan dengan pengambilan alat yang sudah dipasang dan dikirim ke laboratorium rujukan Kementerian Lingkungan Hidup untuk dianalisis hasilnya dengan nilai hasil sebesar 93, 72 Kategori Sangat Baik ($90 \leq x \leq 100$) dari hasil analisis pengujian di 4 (empat) titik sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengujian Kualitas Udara dengan 2 Parameter

NO	TANGGAL PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI	PERUNTUKAN	NILAI PEMANTAUAN	
						NO ₂ (Åµg/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m3) (Sulfur Dioksida)
1	30 Agustus 2024	2	Perkantoran	Belakang Kantor DPRD Sikka Jl. Eltari	PERKANTORAN	4.77	5.79
2	30 Agustus 2024	2	Pemukiman	Perumnas Jl. Dahlia	PEMUKIMAN	1.53	2.8
3	30 Agustus 2024	2	Industri	PLTNG 40 MW Maumere Jl. Trans Maumere-Larantuka	INDUSTRI	9.64	8.47
4	30 Agustus 2024	2	Transportasi	Jl Ahmad Yani Kantor Dinas Pariwisata (Eks Kantor Bupati)	TRANSPORTASI	6.35	5.03
5	5 Juli 2024	1	Transportasi	Jl Ahmad Yani Kantor Dinas Pariwisata (Eks Kantor Bupati)	TRANSPORTASI	6.03	8.77
6	5 Juli 2024	1	Industri	PLTNG 40 MW Maumere Jl. Trans Maumere-Larantuka	INDUSTRI	7.22	9.62
7	5 Juli 2024	1	Pemukiman	Perumnas Jl. Dahlia	PEMUKIMAN	1.55	3.23
8	5 Juli 2024	1	Perkantoran	Belakang Kantor DPRD Sikka Jl. Eltari	PERKANTORAN	2.59	4.61

Sumber : Aplikasi IKLH Tahun 2024

Tabel 3.10
Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Kabupaten/ Kota	Perhitungan Indeks					IKU
	Rataan Per Parameter		Indeks dibagi Bakumutu		Rataan	
	NO ₂ (ug/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (ug/m3) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (ug/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (ug/m3) (Sulfur Dioksida)	Indeks	
Kabupaten Sikka	4.96	6.04	0.12	0.30	0.21	93.7 2

Sumber : Aplikasi IKLH Tahun 2024



Perolehan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2024 yaitu sebesar 67,60. Dengan demikian maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 dapat dihitung menggunakan rumus perhitungan IKLH = $(0,376 \text{ IKA}) + (0,405 \text{ IKU}) + (0,219 \text{ IKL})$ atau $\text{IKLH} = (0,376 \times 53,33) + (0,405 \times 93,72) + (0,219 \times 67,60)$ yaitu sebesar 72,82. Adapun rincian perhitungan IKLH pada aplikasi IKLH dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

Pada pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka terdapat 2 permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a) Alat dan bahan penunjang kegiatan pengujian/pemantauan lingkungan belum memadai dan belum memenuhi standar baku mutu lingkungan. Oleh karena itu perlu penambahan alat maupun bahan penunjang kegiatan pemantauan Kualitas lingkungan baik pemantauan kualitas air dan udara (dibutuhkan alat yang memenuhi spesifikasi parameter wajib).
 - b) Belum adanya Sumber Daya Manusia pengelola laboratorium. Oleh karena itu perlu adanya penempatan pegawai yang menangani Laboratorium.
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.62.399.310,- realisasi Rp.52.449.470,- atau 84,05%, dengan sub kegiatan:
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp.62.399.310,- realisasi Rp.52.449.470,- atau 84,05%.

Dana ini digunakan untuk melakukan monitoring dalam daerah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, sebanyak 85 kegiatan monitoring yang terdiri dari 79 usaha dan/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan 6 usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Tempat usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemberian informasi adalah tempat usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen ijin lingkungan dan juga tempat usaha yang belum memiliki ijin lingkungan.



Pada pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terdapat 3 permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a) Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlunya penambahan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat dan pelaku usaha dana/ atau kegiatan akan pentingnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- b) Masih banyak lokasi usaha dan/atau kegiatan yang letaknya jauh (diluar kota) tidak dapat diawasi karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu Perlunya alokasi dana yang memadai agar dapat dilakukan pengawasan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin yang letaknya jauh dari kota
- c) Kurang adanya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa dan kelurahan dalam kaitan dengan pengawasan terhadap aktivitas penambangan masyarakat . Oleh karena itu Perlunya komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi terkait (DLH, ESDM, dll) dengan pemerintah desa/kelurahan terkait pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Alokasi anggaran sebesar Rp.609.032.586,80,- realisasi Rp.584.322.579,- atau 95,94%, dengan kegiatan:

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sikka, alokasi anggaran sebesar Rp.609.032.586,80,- realisasi Rp.584.322.579,- atau 95,94%, dengan sub kegiatan:

➤ Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran sebesar Rp.609.032.586,80,- realisasi Rp.584.322.579,- atau 95,94%.

Beberapa hasil beberapa hasil kegiatan RTH yang dilakukan :

1. Dibangunnya taman kota/ taman lingkungan, baru di perempatan Tugu Mof.
2. Penempatan pot-pot bunga di sepanjang jalan Ahmad Yani sampai depan Polres.
3. Melakukan rehabilitasi atau pemulihan area yang terbengkalai menjadi area penghijauan lainnya.
4. Adanya penurunan suhu di beberapa lokasi/lingkungan yang berdekatan dengan Taman kota.



5. Ada beberapa lokasi Taman yang digunakan masyarakat untuk berolahraga dan berekreasi.
6. Dibangunnya Tugu Patung Frans Seda di taman Adi Sucipto.
7. Adanya kolaborasi dari masyarakat dan pihak swasta lainnya bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka dalam kegiatan penghijauan taman.

Pemeliharaan di taman - taman RTH dilakukan secara rutin setiap hari kerja. Tanaman – tanaman yang ada bertumbuh semakin besar dan hijau serta sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi. Kegiatan pengawasan di seluruh taman RTH dilakukan sekali dalam seminggu. Hasil dari pengawasan ini ditemukan ada beberapa tanaman / vegetasi di setiap taman – taman RTH mengalami kerusakan akibat perubahan iklim dan pengrusakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa tanaman yang sengaja di potong, dicabut dan dibiarkan begitu saja bahkan sampai dicuri. Pendataan yang dihasilkan dari kegiatan Ruang Terbuka Hijau berupa 15 taman dengan Luas keseluruhan : 68.108 m² dengan perincian pada *Lampiran 12*.

- Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Konservasi Daerah Mata Air dan DAS alokasi anggaran sebesar Rp.0,- realisasi Rp.0,- atau 0%. Adapun sub kegiatan ini muncul dalam DPPA Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan pada awalya adanya anggaran sebesar Rp. 300.000.000 sebagai Dana Hibah dari BKSDA Provinsi NTT. Namun ketika pergeseran anggaran tersebut ternyata dipindahkan ke Dinas Perikanan sehingga anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup menjadi 0.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Alokasi anggaran sebesar Rp.24.690.000,- realisasi Rp.24.378.800,- atau 98,74%, dengan kegiatan:

- Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.24.690.000,- realisasi Rp.24.378.800,- atau 98,74%, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbun, alokasi anggaran sebesar Rp.24.690.000,- realisasi



Rp.24.378.800,- atau 98,74%.

Dana ini digunakan untuk Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Kupang) untuk melakukan koordinasi menyangkut pengelolaan limbah B3 yang bukan kewenangan Kabupaten yaitu dalam pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan tetapi merupakan kewenangan Provinsi sebanyak 1 (satu) kali koordinasi. Selain itu juga dilakukan pendataan dan pengelolaan Limbah B3. Dalam penyelenggaraan di tahun 2024 Kegiatan Limbah B3 menyelenggarakan monitoring dan pengawasan dengan kelompok sasaran adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 seperti Objek Vital Negara, usaha Bengkel, Salon, Pengolahan Ikan, Usaha Tahu Tempe, Rumah Makan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas. Fokus kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat dan para pelaku usaha tentang penanganan Limbah B3.

Dalam kegiatan monitoring dan pengawasan Limbah B3, masyarakat maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 mengharapkan kegiatan seperti ini perlu dilakukan agar masyarakat ataupun pengusaha dapat memahami tentang pengelolaan limbah B3. Pada kegiatan tersebut mengarahkan kepada masyarakat maupun pelaku usaha untuk mengelolah sampah khususnya sampah limbah B3 untuk diolah atau dilakukan penanganan secara baik sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan. Seperti menyediakan TPS Limbah B3, IPAL, Sumur Resapan dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan di tahun 2024 selain melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan juga memberikan Rekomendasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Beberapa rekomendasi yang diberikan berupa Rekomendasi IPAL dan TPS Limbah B3.

Sesuai dengan data yang ada jumlah tempat usaha yang menghasilkan limbah B3 sampai dengan periode 2023 yang sudah diinventarisir sebanyak 119 tempat usaha. Yang sudah mengurus rekomendasi tempat penyimpanan sementara limbah B3 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 15 tempat usaha. Tahun 2019 sebanyak 4 rekomendasi (3,36%), tahun 2020 sebanyak 6 rekomendasi (5,04%), tahun 2021 sebanyak 1 rekomendasi (0,84%), tahun 2022 sebanyak 4 rekomendasi (3,36%), tahun 2023 sebanyak 5 rekomendasi (4,20%) dan tahun 2024 sebanyak 10 rekomendasi (8,40%). Secara akumulatif dari 2019 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 30 rekomendasi (25,21%). Dilihat dari



persentase pengurusan rekomendasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari tahun 2019 sampai dengan 2024 masih rendah.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 untuk mengurus rekomendasi. Selama kegiatan monitoring di jalankan masih ada usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang belum dikelola dengan baik seperti di bengkel-bengkel mobil dan motor.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Alokasi anggaran sebesar Rp.84.600.310,- realisasi Rp.71.906.700,- atau 85,00%, dengan kegiatan:

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.84.600.310,- realisasi Rp.71.906.700,- atau 85,00%, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, alokasi anggaran sebesar Rp.84.600.310,- realisasi Rp.71.906.700,- atau 85,00%.

Kegiatan ini menasar pada pemrakarsa yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka untuk menilai tingkat kepatuhan pemrakarsa dalam pengelolaan lingkungan sesuai poin – poin yang tertera pada Dokumen Lingkungan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan sehingga dapat melakukan pengelolaan lingkungan sesuai Dokumen Lingkungan yang dikeluarkan.. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar aturan pada poin – poin yang tertera pada Dokumen Lingkungan maupun ditemukan pengelolaan lingkungan yang kurang baik akan dilakukan pembinaan dan edukasi di lapangan dan upaya penegakan hukum.

Selama periode Januari s/d Desember 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka melalui bidang Penaatan dan Peningkatan



Kapasitas Lingkungan Hidup, telah melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebanyak **208 usaha dan/atau kegiatan** dengan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Dilakukan Pengawasan

No .	Usaha dan/atau kegiatan	Jumlah
1.	Pengambilan Mineral Batuan	25
2.	Normalisasi Kali	4
3.	Konstruksi Pelabuhan Perikanan	1
4.	Industri Minuman Beralkohol	2
5.	Laboratorium Klinik	12
6.	Budidaya Sarang Burung Walet	6
7.	Industri Pengolahan Rumput Laut	1
8.	Peternakan Ayam Pedaging	23
9.	Penampungan Sementara Sapi	1
10.	Pabrik Pengolahan Tahu dan Tempe	9
11.	Pengolahan Ikan	6
12.	Pabrik Es	1
13.	Pengolahan Kulit Sapi	2
14.	Warung Makan	34
15.	Pengepul Besi Tua	1
16.	Penampungan Sementara Ayam	1
17.	Produksi Air Minum dalam Kemasan	1
18.	PLTS	3
19.	PLTD	1
20.	Bengkel Mobil dan Moto	25
21.	Peternakan Babi	2
22.	Meubel Kayu	9
23.	Hotel dan Restaurant	2
24.	Rumah Sakit	1
25.	Pabrik dan Toko Roti	2
26.	Pembekuan Daging Ayam	2
27.	Apotik	3
28.	Toko Ice Cream and Tea	3
29.	Laundry	7
30.	Tempat Cuci Motor dan Mobil	5
31.	Salon	13
T o t a l		208

Sumber : Laporan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Dari ke – 208 usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan terdiri dari:

- ✓ 91 usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan
- ✓ 117 usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan



Hasil dari pengawasan usaha dan/atau kegiatan diatas dikategorikan **patuh dan tidak patuh** bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan kegiatan yang tidak beroperasi lagi, sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dikategorikan **baik dan kurang baik** dalam pengelolaan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Patuh : 65 usaha dan/atau kegiatan
- ❖ Tidak Patuh : 22 usaha dan/atau kegiatan
- ❖ Baik : 4 usaha dan/atau kegiatan
- ❖ Kurang Baik : 113 usaha dan/atau kegiatan
- ❖ Tidak beroperasi : 4 usaha dan/atau kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring pengawasan, adanya upaya penegakan hukum terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap poin – poin yang tertera dalam Dokumen Lingkungan dan ditemukan pengelolaan lingkungan yang tidak baik bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan dengan dikeluarkannya surat teguran tertulis. Adapun rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

Adapaun hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- ❖ Banyak sub kegiatan sehingga schedule bertabrakan
- ❖ Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bidang sebagai satu kesatuan tim yang utuh, teristimewa kegiatan monitoring terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan dokumen lingkungan
- ❖ Ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap poin – poin pengelolaan lingkungan yang terdapat pada Dokumen Lingkungan
- ❖ Kurang adanya koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Wilayah dan Aparat Penegak Hukum dalam kaitan dengan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan

Oleh karena itu upaya pemecahan/ solusi yang dilakukan yaitu:

- ❖ Perlu pembagian jadwal kerja kegiatan yang merata pada setiap bulannya
- ❖ Perlunya terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antar seksi dan bidang-bidang terkait



- ❖ Perlu upaya penegakan hukum yang lebih tegas bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar poin – poin pada Dokumen Lingkungan
- ❖ Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi terkait (DLH, ESDM dll) dengan pemerintah wilayah terkait pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Alokasi anggaran sebesar Rp.159.998.900,- realisasi Rp.157.769.320,- atau 98,61%, dengan kegiatan:

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.159.998.900,- realisasi Rp.157.769.320,- atau 98,61%, dengan sub kegiatan:

➤ Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, alokasi anggaran sebesar Rp.147.999.250,- realisasi Rp.145.769.670,- atau 98,49%.

Pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup selama Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut :

a. Pelatihan Pengolahan Sampah kepada Kelompok Swadaya Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Pengolahan Sampah kepada Kelompok Swadaya Masyarakat Hogor Hini dilakukan di Gedung TPS 3R RT.005/RW.004 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok. Sasaran kegiatan pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik adalah Masyarakat Kampung Garam Kelurahan Kota Uneng yaitu ibu rumah tangga dan para pemulung sebanyak 25 orang yang telah dibentuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat Hogor Hini Pengelola Sampah di Kawasan Pemukiman Kampung Garam, Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Tahun 2024, yang di telah di sahkan dengan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor Disling.660.5/12/V/2024.

Adapun pelaksanaan pelatihan terbagi menjadi **3 kegiatan** yaitu :

- Pelatihan Pengolahan Sampah Organik menjadi *Eco Enzym* (29 Mei 2024)
- Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik menjadi *Eco Brick* (30 Mei 2024)



- Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik menjadi *Eco Paving Block*

b. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2024

Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok yang berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Daerah. Penghargaan Kalpataru diberikan dengan tujuan untuk menghargai upaya dan jasa bakti dalam melestarikan lingkungan hidup, mendorong penerimanya untuk terus menjaga dan meningkatkan upaya perlindungan lingkungan hidup serta Penghargaan Kalpataru diberikan kepada penerima yang telah melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup secara mandiri, tanpa pamrih, dan swadaya.

Beberapa kategori penghargaan Kalpataru, yaitu: Perintis Lingkungan, Pengabdian Lingkungan, Penyelamat Lingkungan. Penilaian dilakukan bagi 14 calon nominasi penerima Penghargaan Kalpataru. Dari ke – 14 calon nominator, dipilih 10 calon penerima penghargaan yang masuk ke dalam kategori untuk dilakukan penilaian dan penentuan juara pada setiap kategori. Dari 10 calon penerima Penghargaan Kalpataru dilakukan penilaian kemudian diperoleh hasil :

- Kategori Perintis Lingkungan
 - Juara I : Fransiskus Walo
 - Juara II : Arman
- Kategori Pengabdian Lingkungan
 - Juara I : Emanuel Nong Endy
 - Juara II : Pasifisius Wangge
- Kategori Penyelamat Lingkungan
 - Juara I : Kelompok Tani Evata
 - Juara II : Komunitas Youth Voice Now – Yayasan FREN
- Kategori Pembina Lingkungan
 - Juara I : Mgr. Ewaldus Martinus Sedu, Pr

Profil kegiatan penerima penghargaan kalpataru tingkat kabupaten Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran 14*.



c. Penghijauan/konservasi daerah mata air melalui pemberdayaan masyarakat

Kegiatan penanaman dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Waiblama, Pemerintah Desa Ilinmedo, Pemerintah Desa Tanarawa dan Pemerintah Desa Werang serta Anggota Kelompok Pelestari Sumber Air Desa Ilinmedo, Anggota Kelompok Pelestari Sumber Air Desa Tanarawa dan Anggota Kelompok Pelestari Sumber Air Desa Werang. Kegiatan ini juga merupakan pendampingan Gerakan peduli lingkungan bagi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Kelompok Pelestari Sumber Air. Jumlah anggota KPSA setiap desa sebanyak 12 orang melakukan pembibitan anakan dan mengikuti kegiatan penanaman. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penghijauan di Daerah Mata Air Kecamatan Waiblama agar terjaga debit mata air sehingga suplai air menuju Bendungan Napungete selalu bertambah dari tahun ke tahun. Hasil dari kegiatan Penghijauan/konservasi daerah mata air melalui pemberdayaan masyarakat ini yaitu:

1. Desa Ilinmedo

- Anakan yang ditanam yaitu Ara sebanyak 27 anakan, Beringin sebanyak 26 anakan dan Bambu sebanyak 40 anakan
- Penanaman dilakukan di sekitar mata air Uet, Desa Ilinmedo
- Penghijauan dilakukan pada daerah tangkapan air

2. Desa Tanarawa

- Anakan yang ditanam yaitu Ara sebanyak 27 anakan, Beringin sebanyak 26 anakan dan Bambu sebanyak 40 anakan
- Penanaman dilakukan di sekitar mata air Helir, Desa Tanarawa
- Penghijauan dilakukan pada daerah tangkapan air

3. Desa Werang

- Anakan yang ditanam yaitu Ara sebanyak 26 anakan, Beringin sebanyak 26 anakan dan Bambu sebanyak 40 anakan
- Penanaman dilakukan di sekitar Mata Air Klodeng, Mata Air Wiatour dan Mata Air Bakarniur, Desa Werang
- Penghijauan dilakukan pada daerah tangkapan air



- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, alokasi anggaran sebesar Rp.11.999.650,- realisasi Rp.11.999.650,- atau 100%.

Kegiatan penyuluhan lingkungan terkait konservasi sumber daya air dengan tema pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat. Penyuluhan lingkungan dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai konservasi sumber mata air bagi 3 Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam di 3 Desa sekitar Bendungan Napun Gete yang mata air nya memberikan kontribusi air bagi bendungan yaitu KPSA Desa Ilin Medo, KPSA Desa Tanarawa dan KPSA Desa Werang. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu penghijauan di sekitar daerah tangkapan air untuk kebutuhan air di Bendungan Napun Gete.

Adapaun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

- ❖ Kurangnya koordinasi dengan pihak kelurahan terkait anggota kelompok pelatihan dari sisi usia tidak layak/produktif
- ❖ Koordinasi ke kelompok penghijauan tidak maksimal karena jarak tempuh ke lokasi penangkaran jauh dan sulit
- ❖ Kurangnya koordinasi dengan pihak wilayah terkait data dan informasi untuk potensi lokasi penilaian kalpataru
- ❖ Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang disiapkan oleh calon penerima kalpataru kurang maksimal
- ❖ Peserta pelatihan tidak layak/produktif dari sisi usia
- ❖ Kurangnya peserta penyuluhan dari kelompok yang hadir saat penyuluhan

Oleh karena itu upaya pemecahan/ solusi yang dilakukan yaitu:

- ❖ Meningkatkan koordinasi dan informasi terkait kegiatan yang akan dilakukan.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran sebesar Rp.94.991.520,- realisasi Rp.61.146.520,- atau 64,37%, dengan kegiatan:

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.94.991.520,- realisasi Rp.61.146.520,- atau 64,37%, dengan sub kegiatan:



- Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.74.991.930,- realisasi Rp.50.451.930,- atau 67,28%.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dilakukan dengan :

- Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
- Rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan
- Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan

Selama Tahun Anggaran 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, telah menerima 20 aduan dan menangani 17 kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari 17 kasus pengelolaan pengaduan, dilakukan penyelesaian sengketa lingkungan dengan melakukan dialog/diskusi bersama pihak – pihak yang terkait sehingga dihasilkan sebuah Berita Acara Kesepakatan sebanyak **5 kasus**. Adapun 3 kasus aduan lainnya tidak di tindaklanjuti karena bukan merupakan kewenangan dari pihak DLH untuk menindaklanjutinya. Adapun rincian pengaduan dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

- Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.19.999.590,- realisasi Rp.10.694.590,- atau 53,47%.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan maupun pengaduan, jika ditemukan hal – hal yang tidak sesuai dengan proses pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka akan diterapkan sanksi administrasi berupa surat teguran tertulis.

Selama Tahun Anggaran 2024, Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan telah mengeluarkan **15 sanksi administrasi** kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan yang baik. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi sebanyak **5 kegiatan**. Rincian pelaksanaan kegiatan penerapan sanksi administrasi dapat dilihat pada *Lampiran 13*.



Adapaun hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

- ❖ Terbatasnya informasi mengenai tata cara pengaduan terhadap pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga masih banyak kemungkinan adanya pengaduan lain yang tidak diketahui
- ❖ Rendahnya kesadaran masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran PPLH namun tidak melakukan pengaduan

Oleh karena itu upaya pemecahan/ solusi yang dilakukan yaitu:

- ❖ Sosialisasi tata cara pengaduan
- ❖ Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Alokasi anggaran sebesar Rp.7.892.048.020,- realisasi Rp.7.353.898.383,- atau 93,18%, dengan kegiatan:

- Pengelolaan Sampah, alokasi anggaran sebesar Rp.7.892.048.020,- realisasi Rp.7.353.898.383,- atau 93,18%, dengan sub kegiatan:

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, alokasi anggaran sebesar Rp.25.148.410,- realisasi Rp.25.058.410,- atau 99,64%.

Dana ini digunakan untuk Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang dilakukan di 5 kelurahan di wilayah perkotaan diantaranya yaitu Kelurahan Kabor, Kelurahan Kota Uneng, Kelurahan Nangalimang, Kelurahan Wolomarang dan Kelurahan Wairotang.

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.3.611.906.000,- realisasi Rp.3.076.593,- atau 85,18%.

Dana ini merupakan bagian dari dana insentif fiskal kinerja tahun berjalan tahun 2024 sebagai penghargaan kinerja tahun berjalan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan 2 unit mobil sampah amroll + container terbuka 6 m3, 2 unit



dum truck sampah serta 7 unit container sampah. Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan sampah dan Limah B3 tahun anggaran 2024 dapat secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran 16*.

- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.156.867.160,- realisasi Rp.155.571.960,- atau 99,17%.

Dana ini digunakan untuk menyusun Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada. Adapun dana digunakan untuk proses konsultasi dan koordinasi penyusunan Jakstrada, kaji banding penyusunan Jakstrada, harmonisasi penyusunan Jakstrada hingga akhirnya berhasil tersusunnya Peraturan Bupati Sikka tentang Jakstrada 1 (satu) dokumen.

- Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, alokasi anggaran sebesar Rp.4.098.126.450,- realisasi Rp.4.096.675.013,- atau 99,96%.

Dana ini digunakan untuk pemeliharaan kontener sampah, BBM untuk kendaraan angkut sampah, belanja Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Sampah, belanja suku cadang kendaraan sampah, alat pembersih sampah, honorarium 118 orang tenaga kebersihan pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta biaya pemeliharaan motor roda tiga dan mobil sampah.

Kegiatan pengurangan sampah melakukan monitoring kaitan dengan pemilahan jenis sampah di kelompok ataupun masyarakat. Sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemilihan sampah dari sumber sampah baik itu sampah Rumah Tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal ini dibuktikan masih banyak volume sampah yang bisa didaur ulang masuk atau dibuang ke TPA. Kegiatan penanganan sampah melakukan monitoring yang berkaitan dengan penagihan retribusi sampah, pengangkutan dan penanganan sampah di lokasi TPA. Selama pelaksanaan monitoring masih banyak pelanggan retribusi yang enggan membayar retribusi persampahan dan masih banyak tumpukan-tumpukan sampah yang masih berserakan. Hal ini karena pelayanan pengangkutan sampah



belum maksimal dan ketersediaan prasarana penanganan sampah yang masih minim.

Jumlah volume sampah sebanyak 17.666,64 ton dan dan pengangkutan sampah yang dilayani selama tahun 2024 tersebar di 5 wilayah sebanyak 9.028,8 ton atau dapat dihitung bahwa tingkat pelayanan penanganan sampah di wilayah Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae dan Kewapante sebesar 51,11% dan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Data Volume Sampah dan Jumlah Pengangkutan Sampah Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan Sampah (Ton/tahun)
1.	Alok	32.668	13,07	4.704,19
2.	Alok Barat	23.575	9,43	3.394,80
3.	Alok Timur	32.960	13,18	4.746,24
4.	Kewapante	15.063	6,03	2.169,07
5.	Kangae	18.419	7,37	2.652,34
Total			49,07	17.666,64

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Tahun 2024

Adapun permasalahan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) selama Tahun 2024 sebagai berikut:

- ❖ Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga berpengaruh pada laju timbulan volume sampah yang terus bertambah dan berpengaruh pada tingginya tingkat pencemaran sampah atau limbah di wilayah Kabupaten Sikka
- ❖ Perilaku konsumtif masyarakat
- ❖ Perilaku Masyarakat yang belum benar dalam mengelola sampah
- ❖ Kurangnya Sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai
- ❖ Kurangnya SDM dan Anggaran pengelolaan sampah
- ❖ Penegakan Regulasi dan kebijakan yang belum optimal

Terhadap rekapan anggaran sebesar Rp.13.123.498.975,66 pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang dikelola dalam 9 Program, 16 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Dan terealisasi sebesar Rp. 12.319.883.718 atau sebesar 93,88%



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Kinerja untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 93,88% dan 122,22%.
2. Realisasi Pendapatan Retribusi Sampah Tahun 2024 dari target Pendapatan sebesar Rp500.000.000,- tercapai Rp472.405.700,- atau sebesar 94,4%.
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebesar 72,82 dengan capaian kinerja sebesar 103,87 % dan dirincikan sebagai berikut:
 1. Indeks Kualitas Air Tahun 2024 sebesar 53,33 melebihi target (104,57%)
 2. Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 sebesar 93,72 melebihi target (100,35%)
 3. Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 sebesar 67,60 (100,34%)
 4. Persentase Penanganan Sampah Perkotaan tahun 2024 sebesar 51,11% tidak mencapai target (64,30%)
- Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN dengan Indikator Indeks Profesional ASN tahun 2024 sebesar 76,25 melebihi target (102,97%)
- Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dengan indikator indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar 0,32 tidak mencapai target (91,43%)
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dengan sasaran nilai SAKIP belum diketahui karena belum dilakukan evaluasi SAKIP oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sikka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan adalah :

1. Perlu upaya penegakan hukum yang lebih tegas bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar poin – poin pada Dokumen Lingkungan
2. Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi terkait (DLH, ESDM dll) dengan pemerintah wilayah terkait pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan
3. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait berbagai peraturan perundang-undangan terkait mekanisme dan syarat-syarat pengurusan rekomendasi lingkungan, tata cara pengaduan, pengurangan sampah,



- penanganan limbah B3 dan penebangan pohon kepada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
4. Perlu pelibatan masyarakat dan komunitas peduli lingkungan pada aksi bersih dan kegiatan perlindungan lingkungan terus secara rutin
 5. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penanganan sampah dan Limbah B3.
 6. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024, kami buat sebagai pertanggungjawaban kepada Bapak Bupati, terima kasih.

Maumere, 20 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Akulinus, Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19680824 198903 1 012



LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA**

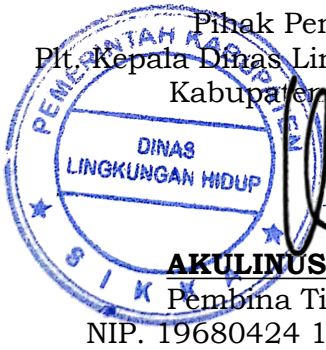
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,11
		IKA : Indeks Kualitas Air	51,00
		IKU : Indeks Kualitas Udara	93,39
		IKL : Indeks Kualitas Lahan	66,97
		Persentase penanganan sampah perkotaan	79,49
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup a.Meningkatnya profesionalitas ASN b.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,41
		Indeks Profesionalitas ASN	76,05
		Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	0,35
3	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	65,94

NO	PROGRAM	ANGGARAN	ASAL ANGGARAN
(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.380.447.108,86	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	711.261.220,00	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	166.429.310,00	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	609.032.586,80	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	24.690.000,00	APBD

6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.600.310,00	APBD
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	159.998.900,00	APBD
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	94.991.520,00	APBD
8	Program Pengelolaan Persampahan	7.892.048.020,00	APBD

Jumlah Anggaran : Rp 13.123.498.975,55

Maumere, 9 Oktober 2024

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

AKULINUS, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012

POHON KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

ISU / MASALAH POKOK	Masih rendahnya layanan persampahan			Lemahnya perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup		Masih adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan		Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap PPLH					Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik DLH		Masih rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran DLH					
MASALAH	Rendahnya pengelolaan sampah	Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan	Menyediakan Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Penanganan Limbah B3	Belum adanya dokumen RPPLH	Belum maksimalnya upaya konservasi dan Pengelolaan RTH	Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan	Belum maksimalnya upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan	Masalah Kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan	Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan maupun terhadap yang belum memiliki ijin lingkungan	Belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap PPPLH	Belum adanya penyusunan kebijakan keberadaan MHA terkait PPPLH	Rendahnya peran masyarakat terhadap PPPLH	Masih rendahnya Profesionalitas ASN	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Masih rendahnya kualitas manajemen kinerja					
AKAR MASALAH	Terbatasnya sarpras persampahan, Kurangnya kualitas dan kuantitas, SDM Bidang Lingkungan Hidup, Belum adanya kebijakan strategis pengelolaan	Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait pengelolaan persampahan, Lemahnya peran	Masih rendahnya Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengendalian dan penanganan limbah B3, Rendahnya tingkat kesadaran	Belum disusunnya dokumen RPPLH, Belum adanya pengendalian pelaksanaan RPPLH	Minimnya SDM dan Sarana dan Prasarana penunjang penataan RTH, Belum adanya PERDA Taman Pemakaman	Tidak adanya dokumen uji kualitas lingkungan hidup, Belum tersedia dokumen standart baku mutu lingkungan	Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan, Belum	Kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penanggulangan pencemaran lingkungan, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan	Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH) yang bersertifikat, Luasnya wilayah jangkauan cakupan pelayanan pembinaan, Belum diikutinya diklat pengawasan lingkungan hidup	Kurangnya koordinasi lintas sektor, Belum maksimalnya penerapan sanksi	Belum adanya data dan informasi profil MHA, Belum maksimalnya peran serta MHA terhadap PPPLH	Kurangnya informasi/edukasi terkait PPPLH	Masih rendahnya kompetensi aparatur di bidang lingkungan hidup	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja DLH	Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja					
MISI	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup												Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Mewujudkan Reformasi Birokrasi					
TUJUAN	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup												Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada DLH		Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran DLH					
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)												Indeks kualitas pelayanan publik DLH		Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					
SASARAN	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup												Meningkatnya profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup					
INDIKATOR KINERJA SASARAN	Indeks Kualitas Air					Indeks Kualitas Udara			Indeks Kualitas Lahan		Persentase Penanganan sampah perkotaan		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	Nilai SAKIP					
PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3		Program Pengelolaan Persampahan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
PENANGGUNG JAWAB	Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan		Bidang Tata Lingkungan			Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup					Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3					Sekretariat		Sekretariat		

Meumere, 9 Oktober 2024
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,
A. Sulis, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012

CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

KEPALA
DAERAH

RPJMD KABUPATEN SIKKA

VISI

MISI I

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas

MISI II

Mewujudkan Reformasi Birokrasi

TUJUAN

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

INDIKATOR TUJUAN

Derajat kesehatan masyarakat

INDIKATOR TUJUAN

Indeks reformasi birokrasi

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup

Meningkatnya
layanan
persampahan

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
urusan pemda

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi
birokrasi

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)

Persentase
Penanganan
Sampah
Perkotaan

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Nilai LPPD

Opini BPK

Nilai SAKIP

Indeks Kepuasan
Masyarakat

TARGET / SATUAN

61,87%

67,59%

TARGET / SATUAN

30.845

WTP

B

2,60

ESELON II

RENSTRA

TUJUAN

Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup

TARGET

61,47%

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indeks Kualitas
Air (IKA)

Indeks Kualitas
Udara (IKU)

Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Persentase penanganan sampah perkotaan

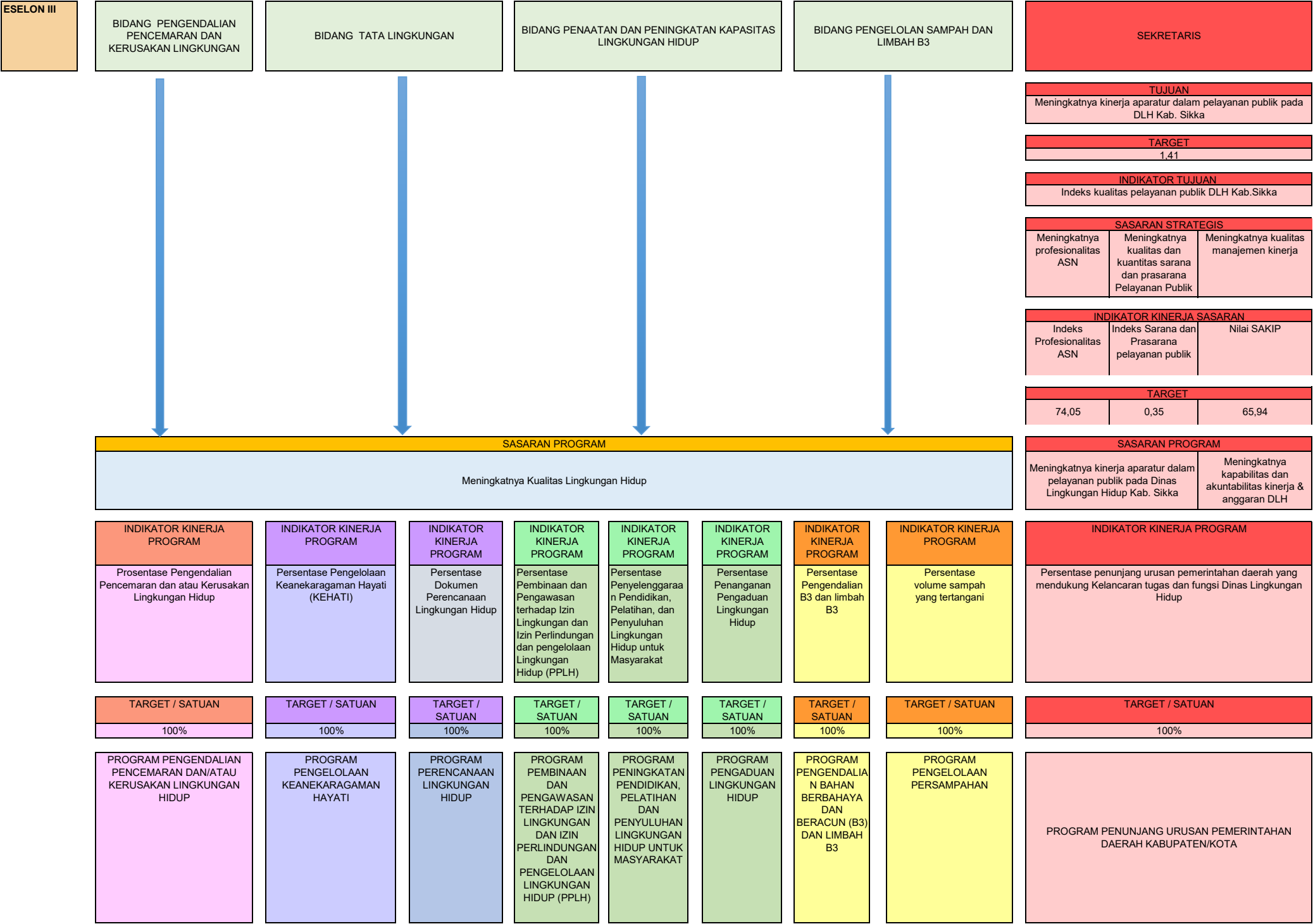
TARGET

51,00

93,39

66,97

79,49%



PEJABAT Fungsional Tertentu	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten Sikka	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sampah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Administrasi Umum Perangkat Daerah / Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran	166.429.310		609.032.587		711.261.220	84.600.310	159.998.900	94.991.520	24.690.000	7.892.048.020	3.380.447.108

Mauwere, 9 Oktober 2024
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Agus S. Sos
Pemula Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		23%	30%	27%	20%	2.209.769.286,26	3.088.523.556,46	2.143.671.143,97	5.681.534.996,97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Akulinus, S.Sos
1	URUSAN NON BIDANG																
	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,41	1,41	1,41	1,41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	30%	28%	19%	23%	925.513.776	986.350.162	719.268.529	749.314.649	Sekretaris - Gaudensius Nong Pio, ST., MT.
	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai SAKIP	-	-	-	65,94	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	12.770.760	12.770.760	12.770.760	12.770.760	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	12.770.760	12.770.760	12.770.760	12.770.760	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	76,05	76,05	76,05	76,05	Kegiatan Administrsai Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi DLH	27%	27%	23%	23%	825.261.067	825.261.067	622.417.068	622.417.068	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang diterima ASN	4	4	3	3	811.375.994	811.375.994	608.531.995	608.531.995	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan keuangan yang tersedia	3	3	3	3	13.885.073	13.885.073	13.885.073	13.885.073	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21%	26%	24%	29%	23.881.435	40.076.235	23.881.435	23.881.435	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan ATK	8	9	9	10	4.830.335	4.830.335	4.830.335	4.830.335	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	1	2.856.300	2.856.300	2.856.300	2.856.300	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	2	1	1	16.194.800	32.389.600	16.194.800	16.194.800	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25%	25%	25%	25%	44.926.204	44.926.204	44.926.204	44.926.204	Albina Bura
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	3	3	8.638.644	8.638.644	8.638.644	8.638.644	
							Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	3	3	36.287.560	36.287.560	36.287.560	36.287.560	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	0,35	0,35	0,35	0,35	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	25%	0%	0%	18.424.310	17.996.710	-	-	Maria Eti
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	0	0	427.600	-	-	-	
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	17.996.710	17.996.710	-	-	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6%	39%	17%	39%	250.000,00	45.319.186,00	15.273.062,00	45.319.182,00	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Proses Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	6	2	6	-	45.069.186,00	15.023.062,00	45.069.182,00	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1	1	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	70,01	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	13%	50%	25%	13%	6.445.360,00	649.999.540,00	48.370.960,00	6.445.360,00	Donatus Salvaritus
		Indeks Kualitas Air (IKA)				51,00	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	25%	0%	50%	25%	6.445.360,00	-	48.370.960,00	6.445.360,00	Donatus Salvaritus
		Indeks Kualitas Udara (IKU)				93,39	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	0	1	1	6.445.360,00	0	6.445.360,00	6.445.360,00	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)				66,97	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun			1		0	0	41.925.600,00	-	
							Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Persentase Dokumen pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0%	100%	0%	0%	-	649.999.540,00	-	-	Donatus Salvaritus
							Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	2	0	0	-	649.999.540,00	-	-	
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	23%	28%	28%	23%	41.607.327,00	41.607.328,00	41.607.328,00	41.607.327,00	Agustinus N. Hamonangan Purba, ST
							Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	25%	25%	25%	25%	26.007.500,00	26.007.500,00	26.007.500,00	26.007.500,00	Hilarius Hila Keytimu, SP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3	3	3	3	26.007.500,00	26.007.500,00	26.007.500,00	26.007.500,00	
							Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	20%	30%	30%	20%	15.599.827,00	15.599.828,00	15.599.828,00	15.599.827,00	Maria Ludgardiana Bora, SH
							Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengendalian Pengawasan terhadap Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	10	15	15	10	15.599.827	15.599.828	15.599.828	15.599.827	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	18%	18%	47%	18%	152258151,8	152258145	152258145	152258145	Donatus Salfaritus, ST
							Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Anakan dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab.	18%	18%	47%	18%	152258151,8	152258145	152258145	152258145	Florentina Oro, S.Si
							Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau /RTH	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	0,6108	0,6108	0,6108	0,6108	152.258.151,80	152.258.145,00	152.258.145,00	152.258.145,00	Yos Heribertus Ledung Lamury, S.Kom
							Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Konservasi Daerah Mata Air dan DAS)	Jumlah Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	1	0	0	0	0	0	
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	50%	50%	0%	0%	12.345.000,00	12.345.000,00	0	0	Pius Markus Temaluru, S.Si
							Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	50%	50%	0%	0%	12.345.000,00	12.345.000,00	-	-	Yuliana Nona Nelvin, SKM
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yg Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota	2	2	0	0	12.345.000,00	12.345.000,00	-	-	
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	8%	54%	38%	0	24.666.550,00	92.332.715,00	42.999.635,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	8%	54%	38%	-	24.666.550,00	92.332.715,00	42.999.635,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
							Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0	2	7	3	0	24.666.550,00	86.332.890,00	36.999.810,00	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0	0	6	6	0	0	5.999.825,00	5.999.825,00	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	30%	27%	16%	27%	25.917.981,00	18.747.981,00	31.577.571,00	18.747.987,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
							Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	30%	27%	16%	27%	25.917.981,00	18.747.981,00	31.577.571,00	18.747.987,00	Maria Anggelina Odje Lalu, SH
							Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5	5	5	10	18.747.981,00	18.747.981,00	18.747.981,00	18.747.987,00	
							Sub Kegiatan Penerapan Sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota	6	5	1	0	7.170.000,00	-	12.829.590,00	-	
		Persentase penanganan sampah perkotaan	19,87	19,87	19,87	19,87	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	25%	25%	25%	25%	1.024.531.613	1.181.398.773	1.037.105.818	4.649.011.818	Pius Markus Temaluru, S.Si
							Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	25%	25%	25%	25%	1.024.531.613	1.181.398.773	1.037.105.818	4.649.011.818	Marselus Lado
							Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0	0	6	7	-	-	12.574.205	12.574.205	
							Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir yang Disediakan	0	0	0	13	0	0	0	3.611.906.000	
							Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	0	1	0	0	0	156.867.160,00	0		
							Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.417	4.417	4.417	4.417	1.024.531.612,50	1.024.531.612,50	1.024.531.612,50	1.024.531.612,50	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18%	36%	27%	18%	21.150.078,00	21.150.078,00	21.150.078,00	21.150.076,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18%	36%	27%	18%	21.150.078,00	21.150.078,00	21.150.078,00	21.150.076,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
							Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup	10	20	15	10	21.150.078,00	21.150.078,00	21.150.078,00	21.150.076,00	

Maumere, 9 Oktober 2024

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Akulinus, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680824 198903 1 012

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,11	72,82	103,87	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	711.261.220,00	711.110.580,00	99,98
		IKA : Indeks Kualitas Air	51,00	53,33	104,57	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	609.032.586,80	584.322.579,00	95,94
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	166.429.310,00	152.298.970,00	91,51
		IKU : Indeks Kualitas Udara	93,39	93,72	100,35	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.600.310,00	71.906.700,00	85,00
		IKL : Indeks Kualitas Lahan	66,97	67,6	100,94	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	159.998.900,00	157.769.320,00	98,61
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	94.991.520,00	61.146.520,00	64,37
		Persentase penanganan sampah perkotaan	79,49	51,11	64,30	Program Pengelolaan Persampahan	7.892.048.020,00	7.353.898.383,00	93,18
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,41	1,4	99,29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.380.447.108,86	3.203.051.866,00	94,75
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	76,05	76,25	100,26				
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	0,35	0,32	91,43				
3	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai SAKIP	65,94	-	0,00				

Jumlah Anggaran 2024 : Rp. 13.123.498.975,66
Realisasi Pagu Tahun 2024 : Rp. 12.319.883.718,00

Maumere, 21 Januari 2025

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Akulimus, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680824 198903 1 012

REALISASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		26%	25%	23%	46%	1.489.808.353,00	3.258.247.686,00	1.957.673.459,00	5.614.154.220,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP - Akulinus, S.Sos
1	URUSAN NON BIDANG																
	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik DLH	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	1,41	1,41	1,41	1,41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DLH	31%	30%	15%	24%	672.341.163	1.075.987.937	643.444.669	811.278.097	Sekretaris - Gaudensius Nong Pio, ST., MT.
	Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai SAKIP	-	-	-	65,94	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25%	50%	13%	13%	3.720.000	19.391.400	13.823.640	12.940.000	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4	1	1	3.720.000	19.391.400	13.823.640	12.940.000	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	76,05	76,05	76,05	76,05	Kegiatan Administrsai Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran Tugas dan fungsi DLH	27%	27%	23%	23%	585.264.423	941.616.917	572.792.479	646.427.767	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang diterima ASN	3	5	3	3	561.535.423	933.916.917	566.842.479	628.282.767	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan keuangan yang tersedia	3	3	3	3	23.729.000	7.700.000	5.950.000	18.145.000	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31%	12%	12%	45%	6.460.000	38.710.670	17.703.600	48.736.180	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan ATK	12	3	4	17	3.230.000	1.947.000	2.203.600	11.913.850	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	0	0	0	3.230.000	1.000.000	500.000	6.686.000	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0	2	1	2	-	35.763.670	15.000.000	30.136.330	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25%	25%	25%	25%	38.467.720	39.396.950	37.059.950	48.357.720	Albina Bura
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	3	3	2.924.770	3.893.000	2.519.000	20.354.480	
							Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	3	3	3	35.542.950	35.503.950	34.540.950	28.003.240	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.	Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik	0,35	0,35	0,35	0,35	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	25%	0%	0%	35.649.020	772.000	-	-	Maria Eti
							Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	-	427.600	-	-	
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	0	0	0	35.649.020	344.400	-	-	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6%	39%	17%	39%	2.780.000,00	36.100.000,00	2.065.000,00	54.816.430,00	Maria Eti
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Proses Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	6	1	7	2.780.000	35.100.000	2.065.000	54.816.430	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	4	0	0	-	1.000.000	-	-	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	70,01	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	13%	50%	25%	13%	12.287.840,00	649.886.549,00	29.440.000,00	19.496.191,00	Donatus Salvaritus
		Indeks Kualitas Air (IKA)				51,00	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang Tersedia	25%	0%	50%	25%	12.287.840,00	-	29.440.000,00	19.462.600,00	Donatus Salvaritus
		Indeks Kualitas Udara (IKU)				93,39	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	3	0	-	-	19.327.000	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)				66,97	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	1	0	12.287.840	-	29.440.000	135.600	
							Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Persentase Dokumen pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0%	100%	0%	0%	-	649.886.549,00	-	33.591,00	Donatus Salvaritus
							Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	2	0	0	0	649.886.549	-	33.591	
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.	Prosentase Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	33%	26%	53%	29%	52.050.000,00	12.497.500,00	38.806.000,00	48.945.470,00	Agustinus N. Hamonangan Purba, ST
							Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah dan Laut yang Dilakukan	25%	0%	67%	25%	52.050.000,00	397.500,00	11.100.000,00	36.302.000,00	Hilarius Hila Keytimu, SP

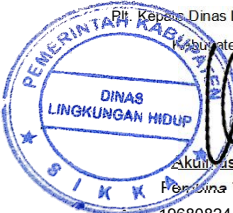
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3	0	8	3	52.050.000	397.500	11.100.000	36.302.000	
							Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	40%	52%	40%	32%	-	12.100.000,00	27.706.000,00	12.643.470,00	Maria Ludgardiana Bora, SH
							Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengendalian Pengawasan terhadap Pencemaran dan kerusakan Lingkungan	20	26	20	16	-	12.100.000	27.706.000	12.643.470	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	18%	18%	18%	18%	112283900	54836180	98391800	318810699	Donatus Salfaritus, ST
							Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-anak dan Luas Lahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab.	18%	18%	18%	18%	112283900	54836180	98391800	318810699	Florentina Oro, S.Si
							Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau /RTH	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	0,6108	0,6108	0,6108	0,6108	112.283.900	54.836.180	98.391.800	318.810.699	Yos Heribertus Ledung Lamury, S.Kom
							Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Konservasi Daerah Mata Air dan DAS)	Jumlah Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0		0	-	-	-	-
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	55%	5%	33%	285%	-	9.260.000,00	13.205.000,00	49.441.700,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55%	5%	33%	285%	-	9.260.000,00	13.205.000,00	49.441.700,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
							Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan hidup	30	3	18	157		9.260.000	13.205.000	49.441.700	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	4%	42%	13%	0	50.522.670,00	69.690.000,00	37.556.650,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
							Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingk.hidup untk lembaga kemasyr. Tingkt daerah kab/kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	4%	42%	13%	-	50.522.670,00	69.690.000,00	37.556.650,00	Maria Antonia Peni Demoor, ST dan Yuliana Elivin Bunga Dey, ST
							Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0	1	7	3	0	50.522.670	61.700.000	33.547.000	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0	0	3	0	0	-	7.990.000	4.009.650	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	27%	30%	11%	19%	7.170.000,00	-	-	53.976.520,00	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si
							Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	27%	30%	11%	19%	7.170.000,00	-	-	53.976.520,00	Maria Anggelina Odje Lalu, SH
							Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4	5	4	4	-	-	-	50.451.930	
		Persentase penanganan sampah perkotaan	19,87	19,87	19,87	19,87	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang tertangani	13%	13%	13%	13%	623.876.650	1.390.676.850	1.064.695.990	4.274.648.893	Pius Markus Temaluru, S.Si
							Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	13%	13%	13%	13%	623.876.650	1.390.676.850	1.064.695.990	4.274.648.893	Marselus Lado
							Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0	1	0	5	-	-	-	25.058.410	
							Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir yang Disediakan	0	0	0	13	-	-	-	3.076.593.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNGJAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	0	1	0	0	43.724.800	83.900.000	11.950.000	15.997.160	
							Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengelolahan Sampah di Instalasi Pengelolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.257,20	2.257,20	2.257,20	2.257,20	580.151.850	1.306.776.850	1.052.745.990	1.157.000.323	
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	50%	50%	0%	0%	9.798.800,00	14.580.000,00	0	0	Pius Markus Temaluru, S.Si
							Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian B3 dan limbah B3	50%	50%	0%	0%	9.798.800,00	14.580.000,00	-	-	Yuliana Nona Nelvin, SKM
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yg Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota	2	2	0		9.798.800	14.580.000	-	-	

Maumere, 21 Januari 2025

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka,



Akmalus, S.Sos Pembina Tingkat 1

19680824 198903 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jendral Sudirman No. 94 Maumere, 86111 NTT
Telp. (0382) 21348 Faks. (0382) 22824
Email: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

DATA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Akulinus, S.Sos NIP. 19680424 198903 1 012	Pembina Tingkat I, IV/b	Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
2	Yoseph H. Vandiron Sales, S.Sos, M.I.Kom NIP. 19720107 199903 1 005	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Menjabat sbg Kadis s/d September 2023
3	Gaudensius Nong Pio, ST., MT. NIP. 19810711 200501 1 008	Pembina Tingkat I, IV/b	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
4	Donatus Salfaritus, ST NIP. 19690702 200012 1 003	Pembina, IV/a	Kabid. Tata Lingkungan	
5	Pius Markus Temaluru, S.Si NIP. 19730711 200212 1 005	Pembina, IV/a	Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
6	Vinsenzo Ferry Hariyanto, S.Si NIP. 19750612 200604 1 006	Pembina, IV/a	Kabid. Penaatan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
7	Agustinus N. Hamonangan Purba, ST NIP. 19740809 200604 1 006	Pembina, IV/a	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
8	Maria Ludgardiana Bora, SH NIP. 19711001 200003 2 004	Penata Tk. I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
9	Maria Antonia Peni Demoor, ST NIP. 19790220 200501 2 009	Penata Tk.I, III/d	Pengawas Lingkungan Ahli Muda	
10	Hilarius Hila Keytimu, SP NIP. 19780119 200604 1 010	Penata Tk.I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
11	Maria Eti NIP. 19680508 199003 2 006	Penata Tk.I, III/d	Kasubag. Keuangan dan Aset	
12	Yos H. Ledung Lamury, S.Kom NIP. 19750507 200804 1 002	Penata Tk.I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	

13	Maria Anggelina Odje Lalu, SH NIP.19780626 200903 2 003	Penata Tk.I, III/d	Analisis Hukum Ahli Muda	
14	Yuliana Elivin Bunga Dey, ST NIP. 19830711 201001 2 028	Penata Tk.I, III/d	Pengawas Lingkungan Ahli Muda	
15	Yuliana Nona Nelvin, SKM NIP. 19860718 201001 2 038	Penata Tk.I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
16	Florentina Oro, S.Si NIP. 19830626 201101 2 005	Penata Tk.I, III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
17	Marselus Lado NIP. 19670928 199401 1 001	Penata , III/c	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	
18	Sebastianus Nong Joni NIP. 19750919 199903 1 005	Penata Muda Tingkat I, III/b	Bendahara	
19	Maria E. Moo Gama Puteri, ST NIP. 19850531 201903 2 004	Penata Muda Tingkat I, III/b	Analisis Lingkungan Hidup	
20	Christofora M. W. Nong Goa, S.Si NIP. 19880411 201903 2 005	Penata Muda Tingkat I, III/b	Analisis Lingkungan Hidup	
21	Aprianus Clause Marton Gajo, ST NIP. 19900424 202203 1 001	Penata Muda, III/a	Penyuluh Lingkungan Hidup	
22	Edelbertha Dolores da Cunha, ST NIP. 19950320 202203 2 002	Penata Muda, III/a	Penyuluh Lingkungan Hidup	
23	Mariana Stevania Ina Sabon, S.Ak NIP. 19970619 202203 2 004	Penata Muda, III/a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	
24	Maria Trince Yesi Almuth NIP. 19810513 200801 2 019	Pengatur Tingkat I, II/d	Bendahara Pengeluaran	
25	Aloysius Yulius Angga Deddy A NIP. 19730717 201212 1 001	Pengatur, II/c	Pembantu Bendahara	
26	Marinus Mariantio Kasang NIP. 19730108 200801 1 009	Pengatur, II/c	Pranata Taman	
27	Reinardus P. Bereok Namang, Amd 19861205 202203 1 001	Pengatur, II/c	Pengelola Sarana Prasarana Pemakaman Umum	
28	Antonius Yulianus NIP. 19800701 200801 1 018	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Juru Pungut Kebersihan	
29	Pati Maramba Nau NIP. 19850507 200801 1 008	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Juru Pungut Kebersihan	
30	Arfinus Marianus Ratu NIP. 19831124 200901 1 006	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Juru Pungut Kebersihan	
31	Fransiskus Borgias NIP. 19681010 200701 1 056	Pengatur Muda, II/a	Juru Pungut Kebersihan	
32	Melkior Suwanto NIP. 19730412 200901 1 002	Pengatur Muda, II/a	Petugas Keamanan	

33	Hironimus Mia Mawe NIP. 19790808 200801 1 012	Pengatur Muda, II/a	Juru Pungut Kebersihan	
34	Mikael Nong Erdis Moa NIP. 19820601 200801 1 010	Juru Tk.I, I/d	Juru Pungut Kebersihan	

Data Pegawai Pensiun :

1	Albina Bura NIP. 19660628 199402 2 004	Penata Tk.I, III/d	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pensiun per 1 Juli 2024
2	Petrus Rubensius Sale NIP. 19661029 200901 1 001	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Pensiun per 1 November 2024

Maumere, 31 Desember 2024

Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Akulinus, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680824 198903 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jendral Sudirman No. 94 Maumere, 86111 NTT
Telp. (0382) 21348 Faks. (0382) 22824
Email: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

DATA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON - ASN)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Marianus Paulus	Tenaga Administrasi Pengelola Sampah
2	Claudia Paulatrix Casandra, S.Tr.Keu	Tenaga Administrasi Keuangan
3	Venda Veronika Sare, S.E	Tenaga Administrasi Kepegawaian
4	Reginalda Yusrianci, SKM	Tenaga Laboratorium
5	Georgerius Rudolf Joko D. Date	Tenaga Administrasi Umum
6	Mikail Budi Cahyadi Sair Saputra	Juru Tagih
7	Yosef Hure	Juru Tagih
8	Agnes Dua Plawi	Juru Tagih
9	Maria Ursulinde Y. Santikara	Juru Tagih
10	Maria Genoveva	Juru Tagih
11	Yulius Marianus Moa	Juru Tagih
12	Yosefina Apriyanti	Juru Tagih
13	Petrus V. Lera	Juru Tagih
14	Yuyun Liman Hege	Juru Tagih
15	Bernardus Tony Gajo, S.M	Juru Tagih
16	Hendrikus Wangge	Pengemudi Mobil Operasional Dinas
17	Yohana Fransiska	Tenaga Penyapu Jalan

18	Samu Allung	Tenaga Penyapu Jalan
19	Ana Maria Tekla, SE	Tenaga Penyapu Jalan
20	Elisabeth Indirani Nona Evi, SE	Tenaga Penyapu Jalan
21	Eminolda Dua Penda	Tenaga Penyapu Jalan
22	Maria Emerensiana Helena	Tenaga Penyapu Jalan
23	Gaudensia Agnetis	Tenaga Penyapu Jalan
24	Hancelinus Hermanto	Tenaga Penyapu Jalan
25	Theresia Maria Falvia Robertha	Tenaga Penyapu Jalan
26	Yulianty Helena	Tenaga Penyapu Jalan
27	Yohanes Subang Sogen	Tenaga Penyapu Jalan
28	Alfonsus Gaspar Diaz Viera, S.M	Tenaga Penyapu Jalan
29	Elisabeth Nona Sandri	Tenaga Penyapu Jalan
30	Agustina Paulina Avila	Tenaga Penyapu Jalan
31	Katarina Ade Rince	Tenaga Penyapu Jalan
32	Anyani Chrislina Tonungtupal	Tenaga Penyapu Jalan
33	Maria Mensiana Merlinda	Tenaga Penyapu Jalan
34	Ludgardis Elvida Nona Erti	Tenaga Penyapu Jalan
35	Mari Fatima	Tenaga Penyapu Jalan
36	Antonius Taso Ngole	Tenaga Penyapu Jalan
37	Stefanus Kei	Tenaga Penyapu Jalan
38	Lusia Ere	Tenaga Penyapu Jalan
39	Marselus Eliseus	Tenaga Penyapu Jalan
40	Maximilianus Moa Neang	Tenaga Penyapu Jalan
41	Aloysia Yahya Oktavia Sedo	Tenaga Penyapu Jalan
42	Maria Novita Bety	Tenaga Penyapu Jalan
43	Stevenabisier Daryabi Namah	Tenaga Penyapu Jalan
44	Kurniawan	Tenaga Penjaga Malam
45	Anselmus Harno Dhae	Tenaga Penyapu Jalan

46	Gregorius Goe Ndoki	Tenaga Penyapu Jalan
47	Maximus Kowan	Tenaga Penyapu Jalan
48	Yosep Nerus	Pengemudi Mobil Sampah Amroll
49	Paulus Nong Once	Pengemudi Mobil Sampah Amroll
50	Tomas Tuang	Pengemudi Mobil Sampah Amroll
51	Fransiskus Xaverius II	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truck
52	Theodatus Bapa	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truck
53	Ayustus Sareng	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truck
54	Bernadus Afrianto	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truck
55	Lubomus Siga	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truck
56	Anyelus Sero	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truck
57	Yoseph Pajo	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truck
58	Siprianus Tiwa Toda	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truck
59	Gregorius Joris	Pengemudi Mobil Sampah Dum Truck
60	Yakup Liufeto	Tenaga Pengangkut Sampah
61	Muhamad Rosady	Tenaga Pengangkut Sampah
62	Yohanes Andriano Sareng	Tenaga Pengangkut Sampah
63	Syarifudin	Tenaga Pengangkut Sampah
64	Nikodemus Meo	Tenaga Pengangkut Sampah
65	Damasus Nagung	Tenaga Pengangkut Sampah
66	Robertus Meo	Tenaga Pengangkut Sampah
67	Emilianus Nong Laro	Tenaga Pengangkut Sampah
68	Yoseph Yansen	Tenaga Pengangkut Sampah
69	Kalektus	Tenaga Pengangkut Sampah
70	Fransiskus Xaverius Nong	Tenaga Pengangkut Sampah
71	Yoseph Marianto Riba	Tenaga Pengangkut Sampah
72	Paskalis Valerianus Tali	Tenaga Pengangkut Sampah
73	Wilfridus Woda	Tenaga Pengangkut Sampah

74	Novensius Elbeth Parera	Tenaga Pengangkut Sampah
75	Hieronimus Herianto Suban	Tenaga Pengangkut Sampah
76	Fransiskus Emiliano Rotan	Tenaga Pengangkut Sampah
77	Kanisius Jivan Jendi	Tenaga Pengangkut Sampah
78	Marianus Oktafianus	Tenaga Pengangkut Sampah
79	Agustinus Bosman Yance Key	Tenaga Pengangkut Sampah
80	Wilfridus Alfonares	Tenaga Pengangkut Sampah
81	Fransiskus Luju, S.Pi	Tenaga Pengangkut Sampah
82	Klemens Qwintus	Tenaga Pengangkut Sampah
83	Dominikus da Cunha	Tenaga Pengangkut Sampah
84	Yulius Lewar	Tenaga Pengangkut Sampah
85	Stefanus Loda	Tenaga Pengangkut Sampah
86	Yoseph Elvidus Lodan	Tenaga Pengangkut Sampah
87	Yosef Sumanto	Tenaga Pengangkut Sampah
88	Dolvianus Adrian Onko	Tenaga Pengangkut Sampah
89	Yosep Erwin Saputra	Tenaga Pengangkut Sampah
90	Robertus Mbasa	Tenaga Pengangkut Sampah
91	Yemy Charles Kamengmau, S.Pd	Tenaga Pengangkut Sampah
92	Claudius William Fernando Lino	Tenaga Pengangkut Sampah
93	Daniel Efraim Maro, S.Pd	Tenaga Pengangkut Sampah
94	Alfonsus Q. Sandriano	Tenaga Pengangkut Sampah
95	Marianus Kristo Pio	Tenaga Pengangkut Sampah
96	Yohanes Aldino San Mi	Tenaga Pengangkut Sampah
97	Markus Amon	Tenaga Pengangkut Sampah
98	Kornelis Loreng	Tenaga Pengangkut Sampah
99	Didartus No Diego	Tenaga Pengangkut Sampah
100	Yanuarius Laka	Tenaga Pengangkut Sampah
101	Floribertus Konradus Nani	Tenaga Pengangkut Sampah

102	Yulianus Teka	Tenaga Pengangkut Sampah
103	Yohanes Edison	Tenaga Pengangkut Sampah
104	Henderikus Nong Jemi	Tenaga Pengangkut Sampah
105	Avelinus Paskalis	Tenaga Pengangkut Sampah
106	Pterus Hilarius Roni, S.Kom	Tenaga Pengangkut Sampah
107	Yohanes Roso, S.Kep.	Tenaga Pengangkut Sampah
108	Dominikus Taopan	Tenaga Pengangkut Sampah
109	Dionisius Isidorus Soda	Tenaga Pengangkut Sampah
110	Agustinus Moat Nai	Tenaga Pengangkut Sampah
111	Elidius Due	Tenaga Pengangkut Sampah
112	Antonius Silviske	Tenaga Pengangkut Sampah
113	Andreas Angelus Kakun	Tenaga Pengangkut Sampah
114	Januarius Pitang Da Gomes, S.Par	Tenaga Pengangkut Sampah
115	Yanuarius Aquino	Tenaga Pengangkut Sampah
116	Martinus Jino, S.Pd.	Tenaga Pengangkut Sampah
117	Yoservus Moan Mitak	Tenaga Pengangkut Sampah
118	Yohanes Aprianus	Tenaga Pengangkut Sampah
119	Krsitanto Woko	Operator Alat Berat
120	Yulianus Rewot	Tenaga Penjaga TPA
121	Marianus Wilfridus Nong Sobar	Sopir Tanki
122	Aloysius Edelbertus Gagi	Petugas Taman
123	Ambrosius	Petugas Taman
124	Laurensius Lan	Petugas Taman
125	Policarpus Mangu	Petugas Taman
126	Vinsensius Heribertus, SP	Petugas Taman
127	Yohanes Gabriel Kenedy	Petugas Taman
128	Yoseph Herman Ngaji	Petugas Taman
129	Yulius Irman Arianto	Petugas Taman

130	Halal Bihalal	Petugas Pemakaman
131	Fransiskus Wilson	Petugas Pemakaman

Maumere, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Akulinus, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680824 198903 1 012

INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL) TAHUN 2024

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan		
						Dusun/RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Budidaya sarang burung walet / Jemmy Gunawan Gondo	Budidaya sarang burung walet	24 Januari 2024/ Disling 660.4 /25/ I/2024	Jemmy Gunawan Gondo /0823 5222 1410	400 m2	Dusun Waipare	Desa Watumilok	Kangae
2	Praktek Mandiri / Klinik Dokter Gigi, Apotek dan Laboratorium Geraldo	Klinik	24 Januari 2024/ Disling.660.4 /27/ I/2024	Drg. Geraldo Arissaputra Kuntani / 0821 3144 3660	80 m2	Jalan Diponegoro, RT.025, RW.005	Kelurahan Wolomarang	Alok Barat
TOTAL DI JANUARI : 2 DOKUMEN SPPL								
1	Toko dan Penginapan TISARI	Hotel Melati	7 Februari 2024/ Disling 660.4 /40/ II/2024	Ishak Djami Bale / 0822 3236 0881	1.729 m ²	Napunglangir, RT.008 / RW.001	Kelurahan Wolomarang	Alok Barat
2	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 59/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	81, 44 m ²	Wuring	Wuring	Alok Barat
3	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 61/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	179 m ²		Langir	Kangae
4	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 63/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	10, 1 m ²		Wuring	Alok Barat
5	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 65/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	109 m ²		Langir	Kangae
6	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 67/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	280 m ²		Langir	Kangae

7	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 69/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	329 m ²		Langir	Kangae
8	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 71/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	7,2 m ²		Hewuli	Alok Barat
9	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 73/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	153 m ²		Langir	Kangae
10	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 75/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	26,72 m ²		Wuring	Alok Barat
11	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 77/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	133 m ²		Langir	Kangae
12	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 79/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	26,72 m ²		Hewuli	Alok Barat
13	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 81/II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	60 m ²		Langir	Kangae
14	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 83/II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	6,4 m ²		Hewuli	Alok Barat
15	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 85/II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	128,16 m ²	Hewuli	Alok Barat	GIP 80 mm, Panjang 1.602 m
16	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 87/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	54 m ²	Langir	Kangae	HDPE 2 (63 mm), Panjang 855 m
17	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 89/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	28,32 m ²		Hewuli	Alok Barat
18	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 91/II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	29,05 m ²		Hewuli	Alok Barat

19	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 93/II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	12,92 m ²		Hewuli	Alok Barat
20	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 95/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	8,45 m ²		Hewuli	Alok Barat
21	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 97/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	20 m ²		Langir	Kangae
22	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4 / 99/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	14,88 m ²		Hewuli	Alok Barat
23	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 101/ II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	62 m ²		Langir	Kangae
24	SPAM Wailiti II oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 103/II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	45,45 m ²		Hewuli	Alok Barat
26	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	27 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 105/II/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	12 m ²		Habi	Kangae
27	Peternakan Ayam Boiler	Peternakan Ayam Boiler	28 Februari 2024 / Disling. 660.4/ 107/ II/2024	Maria R. Lylyanti / 081239267863	12 m ²	Habihodot, RT/RW: 012/006	Desa Talibura	Talibura
TOTAL DI JANUARI : 29 DOKUMEN SPPL								
1	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	18 Maret 2024 / Disling. 660.4/ 130/ III/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	102,52 m ²	Habi	Kangae	HDPE 4 (110 mm), Panjang 932 m
2	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	18 Maret 2024 / Disling. 660.4/ 132/III/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	280 m ²	Habi	Kangae	HDPE 3 (90 mm), Panjang 3.111 m
3	SPAM Kangae oleh PERUMDA Wair Pu'an	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	18 Maret 2024 / Disling. 660.4/ 134/III/2024	Fransiskus Laka, ST, MT / 081339159915	2.124 m ²	Habi	Kangae	HDPE 2 (63 mm), Panjang 3.372 m

[illegible]

1	Perumahan Alok Indah 2	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3 Juni 2024 / Disling. 660.4/ 223.b/ VI/2024	Suwarno / 081339419843	3.000 m ²	Jl. K.S Tubun	Kota Baru	Alok Timur
2	Ternak Ayam Boiler	Ternak Ayam Boiler	24 Juni 2024 / Disling. 660.4/ 240/ VI/2024	Wilhelmus Isolus/ 081339159915	270 m ²	Dusun Patimoa	Desa Kolidetung	Lela
TOTAL DI JUNI : 7 DOKUMEN SPPL								
1	Titian Mangrove	Pembangunan Jalan Jembatan	4 Juli 2024/Disling.660.4/ 248/VI/ 2024	Drs. Lukman, M.Si / 08213520977	6 Ha	Kampung Garam	Kota Uneng	Alok
2	Herson Badminton Hall	Fasilitas Olahraga	8 Juli 2024/Disling.660.4/ 252/VII /2024	Herson Marloanto / 081339198350	1.600 m2	RT.005 / RW.003	Kota Uneng	Alok
3	Indomaret Moa Toda	Minimarket / Retail	18 Juli 2024/ Disling.660.4/ 263/ VII /2024	Wiliandi/ (0341) 752000 / 085335715235	768 m2	RT.008 / RW.002	Kelurahan Kota Baru	Alok Timur
4	PT. Tower Bersama / Tower Hoder	Tower Bersama	30 Juli 2024/Disling.660.4/ 268/VII /2024	Agung Sedayu qq PT. Tower Bersama/ 08123709735	144 m2	RT.009 / RW.005, Dusun Wairbleler	Desa Hoder	Waigete
5	Tower Tana Duen	Tower Bersama	30 Juli 2024/Disling.660.4/ 270/VII /2024	Agung Sedayu qq PT. Tower Bersama/ 08123709735	144 m2	RT.012 / RW.004, Dusun Blatat	Desa Tana Duen	Kangae
TOTAL DI JULI: 5 DOKUMEN SPPL								
1	Indomaret Paga	Minimarket / Retail	9 Agustus 2024/Disling.660.4 /270 /VIII /2024	Wiliandi / (0341) 752000 / 085335715235	575 m2	RT.019 / RW.09, DusunPaga Barat	Desa Paga	Paga
2	Red Bull Karaoke VIP Room	Pub / Room Karaoker	13 Agustus 2024/ Disling.660.4/ 283 /VIII /2024	Silver Nikanor Namah / 082144366677	75 m2	RT.016 / RW.005	Kelurahan Waitoti	Alok Timur
TOTAL DI AGUSTUS: 7 DOKUMEN SPPL								
1	Indomaret Nangahure	Minimarket / Retail	3 September 2024/ Disling.660.4/ 298 /VIII/2024	Wiliandi / (0341) 752000 / 085335715235	586 m2	Nangahure Lembah RT.13 / RW.04	Kelurahan Wuring	Alok Barat

2	FIF	Pembangunan Ruko FIF	10 September 2024/ Disling.660.4/ 304/IX/2024	Kristianus Aryanto / 081339445533	226 m2	Jalan Eltari	Kelurahan Madawat	Alok
3	Indomaret Anggrek	Minimarket / Retail	27 September 2024/ Disling.660.4/ 312/IX/2024	Wiliandi / (0341) 752000 / 085335715235	360 m2	RT.001/RW.002	Kelurahan Madawat	Alok
TOTAL DI SEPTEMBER: DOKUMEN SPPL								
1	Alfamart Lekebai	Pembangunan Minimarket	9 Oktober 2024/ Disling.660.4/ 342 /X/2024	M. Aji Wahyu Wasono / 0812 1286 5552	352 m2	RT.008 / RW. 004, Dusun Nualolo	Bhera	Mego
2	Alfamart Waioti	Pembangunan Minimarket	10 Oktober 2024/ Disling.660.4/ 344 /X/2024	M. Aji Wahyu Wasono / 0812 1286 5552	352 m2	Jl. Jenderal Sudirman, RT.026 / RW. 008	Waioti	Alok Timur
3	Alfamart Lela	Pembangunan Minimarket	11 Oktober 2024/ Disling.660.4/ 346 /X/2024	M. Aji Wahyu Wasono / 0812 1286 5553	350 m2	RT.09 / RW. 05, Dusun Lela	Desa Lela	Lela
4.	Alfamart Nangameting	Pembangunan Minimarket	9 Oktober 2024/ Disling.660.4/ 348 /X/2024	M. Aji Wahyu Wasono / 0812 1286 5553	350 m2	Jl. Ahmad Yani, RT.005 / RW. 002	Nangametingt	Alok Timur
5.	Alfamart Litbang	Pembangunan Minimarket	9 Oktober 2024/ Disling.660.4/ 350 /X/2024	M. Aji Wahyu Wasono / 0812 1286 5553	400 m2	Jl. Litbang, RT.003 / RW. 009,	Kota Uneng	Alok
6.	Alfamart Kimbul	Pembangunan Minimarket	9 Oktober 2024/ Disling.660.4/ 352 /X/2024	M. Aji Wahyu Wasono / 0812 1286 5553	370 m2	Jl. Kimang Buleng, RT.001 / RW. 008	Kota Uneng	Alok
TOTAL PADA OKTOBER: 6 DOKUMEN SPPL								
1.	Indomaret Kota Uneng	Minimarket / Retail	11 November 2024 / Disling.660.4/ 628/XI/2024	Williandi / (0341) 752000 / 085335715235	407,39 m2	Jalan Raya Don Juang, RT.001/ RW.004	Kota Uneng	Alok
2.	Indomaret Kota Uneng	Minimarket / Retail	11 November 2024 / Disling.660.4/ 637/XI/2024	Williandi / (0341) 752000 / 085335715235	461,68 m2	Jalan Maumere - Magepanda, RT.033/RW.007,	Wolomarang	Alok Barat
3.	Tower Bersama Rubit	Menara Telekomunikasi	18 November 2024 / Disling.660.4/ 643/XI/2024	Williandi / (0341) 752000 / 085335715235	300 m2	RT.010/RW.006, Dusun Koker	Pogon	Waigete
TOTAL HINGGA NOVEMBER: 9 DOKUMEN SPPL								

1	Supermarket Rejeki Expres	Minimarket / Retail	10 Desember 2024 / Disling.660.4/ 656/XII/2024	Alex Leo / 082197373333	2.000 m2	Jl. D.I Panjaitan, RT.002/RW.002	Kelurahan Beru	Alok Timur
2.	Indomaret Ahmad Yani	Minimarket / Retail	20 Desember 2024 / Disling.660.4/ 668/XII/2024	Williandi / (0341) 752000 / 085335715235	560 m2	Jalan Ahmad Yani, RT.010/ RW.003	Kelurahan Nangameting	Alok Timur
TOTAL DI DESEMBER: 11 DOKUMEN SPPL								
TOTAL SPPL 2024 : 64 DOKUMEN SPPL								

**INVENTARISASI DOKUMEN RPPLH
UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL/UPL)
TAHUN 2024**

No	Nama Perusahaan / Penanggung Jawab	Jenis Usaha dan /atau kegiatan	Tanggal dan Nomor Rekomendasi	Penanggung Jawab/No.HP	Luas Area	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan			FOTO
						Dusun/ RT/RW	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
1	SPBU Pintar Sumber Energy	SPBU	16 Desember 2024/ Disling 660.4/ 658/XII/2024	Robertus Belarminus / 081281906590	2.194 m2	RT 027/RW 006, Dusun Bao Loran	Desa Nita	Kecamatan Nita	
TOTAL : 1 DOKUMEN UKL -UPL									



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jendral Sudirman No. 94 Maumere, 86111 NTT
Telp. (0382) 21348 Faks. (0382) 22824
Email: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATENSikka
TAHUN 2024

KOMPONEN		NILAI
Indeks Kualitas Air		53,33
Indeks Kualitas Udara		93,72
Indeks Kualitas Lahan		67,60
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	$(0,376 \text{ IKA}) + (0,405 \text{ IKU}) + (0,219 \text{ IKL})$	72,82

Maumere, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Akulinus, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680824 198903 1 012



Kepala Daerah : Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si

Luas Wilayah : - Km²

Populasi : - Jiwa

Kepala DPRD

: Donatus David, S.H.

Kategori Daerah

: TIDAK TERTINGGAL

Pendapatan Per Kapita : -

IKLH
72.82

BAIK

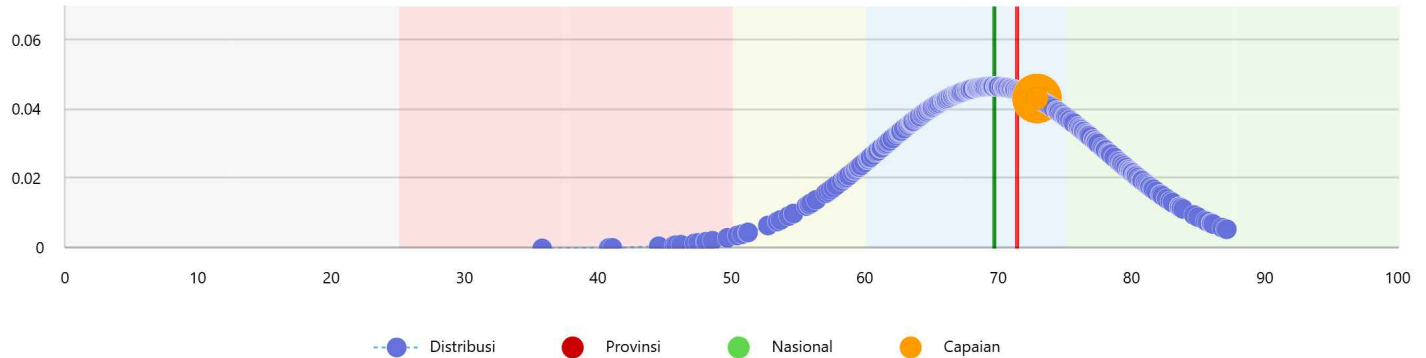
Indeks Respon

Peringkat

Nasional : 155 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 8 dari 22 Kabupaten/Kota

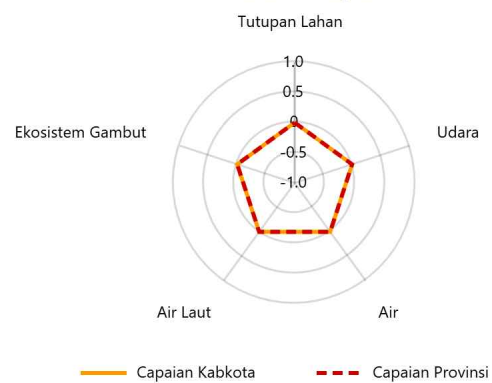
Posisi IKLH



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	4	8	8
AIR	3	6	6
LAHAN	0	1	1
TOTAL	7	15	15

Indeks Respon



Sebaran Titik Pemantauan

IKA
53.33

SEDANG

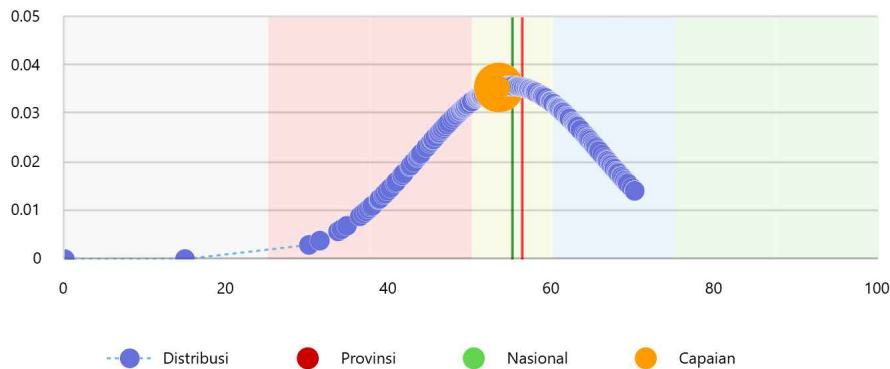
Indeks Respon IKA

Peringkat

Nasional : 149 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 12 dari 22 Kabupaten/Kota

Posisi IKA



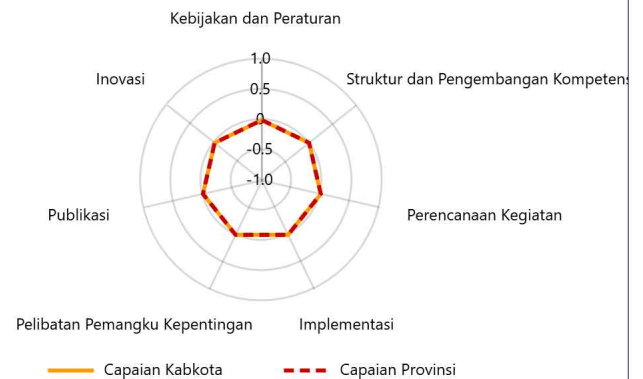
Tren IKA



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	0	0	0
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	3	6	6
TOTAL	3	6	6

Indeks Respon Air



Sebaran Titik Pemantauan

Rekomendasi



IKL
67.60

SEDANG

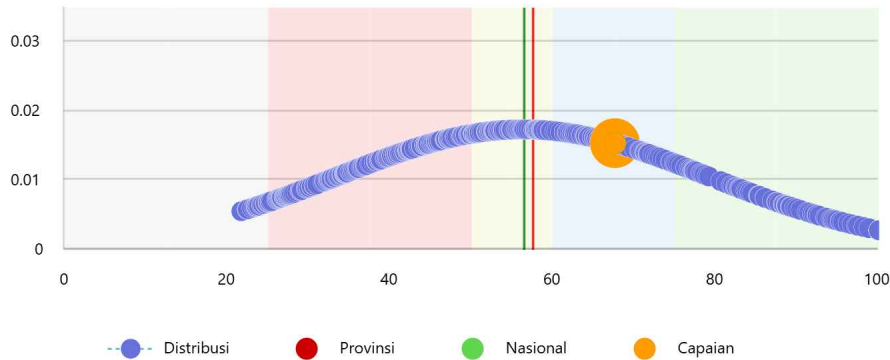
Indeks Respon IKL

Peringkat

Nasional : 113 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 6 dari 22 Kabupaten/Kota

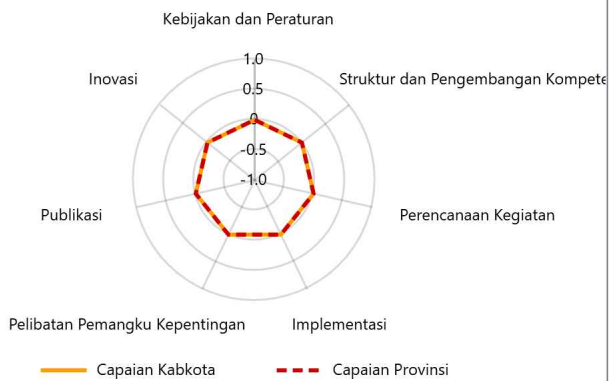
Posisi IKL



Tren IKL



Indeks Respon Tutupan Lahan



Kualitas Tutupan Lahan

Rekomendasi



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Sikka
Provinsi Nusa Tenggara Timur
2024



IKU
93.72

SANGAT BAIK

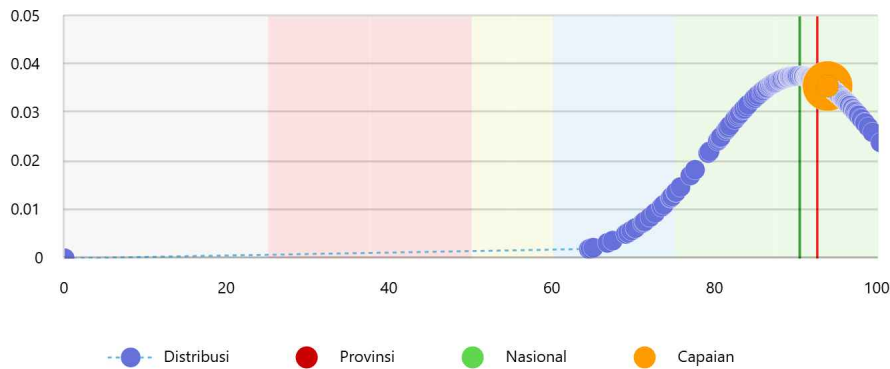
Indeks Respon IKU

Peringkat

Nasional : 130 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 5 dari 22 Kabupaten/Kota

Posisi IKU



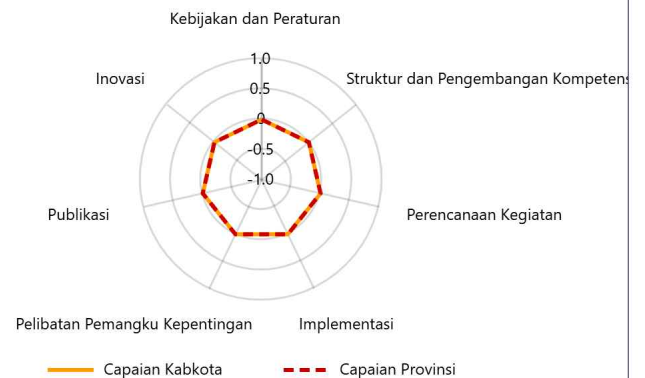
Tren IKU



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	0	0	0
TOTAL	4	8	8

Indeks Respon Udara



Sebaran Titik Pemantauan



Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

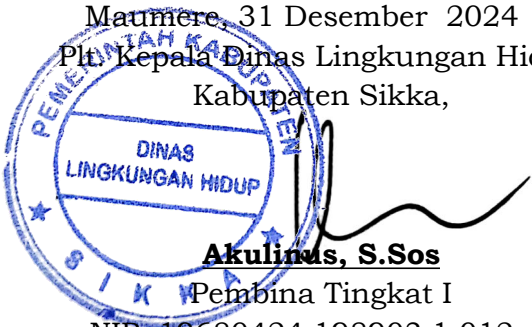
Jln. Jendral Sudirman No. 94 Maumere, 86111 NTT
Telp. (0382) 21348 Faks. (0382) 22824
Email: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

**Daftar Taman Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Maumere
Tahun 2024**

No	Nama Taman RTH	Luas Taman	Vegetasi Yang Ada
1	Taman Samping Pos & Giro	650 m ²	Pandan Hijau, Palem Putri, Bunga Merah, Bogenvile, Andong Merah, Tabebuya Kuning, Karamunting, Pangkas Kuning dan Lidah Mertua.
2	Taman Patung Kuda	1.088 m ²	Angsono, Glodok, Kimeng, Pinang Putri, Kimberli, Kelapa Bali, Lidah Mertua, Pandan Bali, Pucuk Merah, Karamunting, Pangkas Kuning dan Cemara Kipas.
3	Taman Tsunami	9.100 m ²	Cemara Kipas, Cemara Udang, Cemara Papua, Kelapa Bali, Tabebuya, Pucuk Merah, Ketapang Kencana, Anting Putri, Pinang Kuning, Palem Ekor Tupai, Palem Bregu, Palem Merah, Pohon Rita, Suglen, Glodok dan Bogenvile
4	Taman Jalan Eltari	7.644 m ²	Pinang Putri, Cemara Papua, Bogenvile, Lidah Mertua, Karamunting, Pandan Bali, Tabebuya dan Ketapang Kencana
5	Taman Doa Kristus Raja	6.726 m ²	Pohon Tanjung, Glodok, Bogenvile, Flamboyan, Pangkas kuning, Lidah mertua dan Pandan bali
6	Taman Depan RSDU Dr.T.C.Hiller	-	Agave Kembang, Melati, Pangkas Kuning, Lidah Mertua dan Karamunting
7	Taman Jalan Anggrek	175 m ²	Pucuk merah dan Pangkas kuning
8	Taman Lingkar luar depan Hotel Nusra	5.947 m ²	Palem Putri, Palem Ekor Tupai, Tabebuya dan Ketapang Kencana

No	Nama Taman RTH	Luas Taman	Vegetasi Yang Ada
9	Taman Lingkar Luar Lepolima Brai	-	Pucuk Merah, Palem Putri, Bogenvile, Tabebuya dan Ketapang Kencana
10	Taman Lingkar Luar Karmel	-	Palem Putri, Palem Ekor Tupai, Tabebuya dan Ketapang Kencana
11	Taman Adi Sucipto	7.046 m ²	Karamunting, Glogok, Tabebuya Kuning, Cemara Papua, Palem Putri, Lidah Mertua, Bogenvile, Ketapang Kencana
12	Taman Tugu Selamat Datang Maumere	225 m ²	Bogenvile, Lidah Mertua, Agave Kembang, Palem Putri, Kimeng, Pucuk Merah, Karamunting, Pandan Bali
13	Taman Lapangan Kota Baru	18.447 m ²	Bunga Kana, Agave Merah, Pohon Nimba, Kaktus, Bogenvile, Ketapang Kencana, Tabebuya, Kersen
14	Taman Depan SCC	1.060 m ²	Pucuk Merah, Tabebuya, Palem Putri, Agave Merah, Lidah Mertua, Melati, Andong Merah, Pohon Kelapa Sawit, Kembang Sepatu, Karamunting, Agave Kembang, Eforbia
15	Taman Pasar Tingkat Depan Polres	50 m ²	Palem Putri, Palem Hijau dan Pandan Hijau

Maumere, 31 Desember 2024
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,



Akulinus, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012

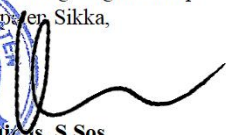
LAMPIRAN 13

PELAKSANAAN KEGIATAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

2.11.11 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01 Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Sub-Kegiatan: Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Kode Rekening : 2.11.10.2.01.0006.5.1.02.04.01.0001

NO	TANGGAL	MAKSUD	NOMOR SURAT KELUAR / PERIHAL	LOKASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
1.	18 Januari 2024	Surat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengambilan minerba oleh saudara Yohanes Brekmans	Disling .660.5/07/I/2024 /Perapian Lokasi Bekas Pengambilan Minerba	Hoba Kelurahan Nangalimang	Mengeluarkan surat penegasan penyampaian perapian lokasi bekas pengambilan minerba kepada penanggung jawab atas nama Yohanes Brekmans
2.	14 Maret 2024	Surat penegasan Normalisasi DAS Waigete	Disling.660.5/119/III/2024/ Penegasan Normalisasi DAS Waigete	DAS Waigete Kecamatan Waigete	Mengeluarkan surat penegasan Normalisasi DAS Waigete kepada saudara Dion Kondi (Penanggungjawab CV. Egon Perkasa dan PT. Waigete Abadi
3.	25 Maret 2024	Surat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging saudara Kris Ware	Disling.660.5./144/III/2024/ Penegasan penyampaian hasil monitoring pengawasan	RT.027/RW.002 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok	Menindaklanjuti hasil monitoring pengawasan reguler tanggal 21 Februari 2024 Nomor : Disling.660.5/ / III/2024 maka dikeluarkan surat penegasan hasil monitoring pengawasan reguler kepada saudara Kris Ware
4.	25 Maret 2024	Surat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan ikan kepada saudara Bahrudin	Disling.660.5./144.a/III/2024/ Penegasan penyampaian hasil monitoring pengawasan	RT.018/RW.003 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok	Menindaklanjuti hasil monitoring pengawasan reguler tanggal 21 Februari 2024 Nomor : Disling.660.5/ / III/2024 maka dikeluarkan surat penegasan hasil monitoring pengawasan reguler kepada saudara Bahruddin
5.	25 Maret 2024	Surat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan tempe tahu kepada saudara Budi Nuryanto	Disling 660.5/144.b/III/2024/ Penegasan penyampaian hasil monitoring pengawasan	RT.020/RW.004 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok	Menindaklanjuti hasil monitoring pengawasan reguler tanggal 21 Februari 2024 Nomor : Disling.660.5/144.b/III/2024 maka dikeluarkan surat penegasan hasil monitoring pengawasan reguler kepada saudara Budi Nuryanto
6.	25 Maret 2024	Surat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan minuman beralkohol kepada saudara Joni	Disling 660.5/144.c/III/2024 / Penegasan penyampaian hasil monitoring pengawasan	Jalan Don Slipi Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat	Menindaklanjuti hasil monitoring pengawasan reguler tanggal 29 Januari 2024 Nomor : Disling.660.5/144.c/III/2024 maka dikeluarkan surat penegasan hasil monitoring pengawasan reguler saudara Joni
7.	23 April 2024	Suurat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan ternak ayam milik Maria Avilianti Marwiwin	Disling.660.5/173.a/IV/2024 / Penegasan penyampaian hasil monitoring pengawasan	RT.07/RW.03 Desa Kolidetung Kecamatan Lela	Mengeluarkan surat penegasan hasil monitoring pengawasan insidentil dan Membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Pencemaran Lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging milik Yuslin Rohani, Maria Avilianti Marwiwin, Gregorius Karinus dengan warga Desa Kolidetung Kecamatan Lela
8.	23 April 2024	Surat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan ternak ayam milik Gregorius Karinus	Disling.660.5/173.b/IV/2024 / Penegasan penyampaian hasil monitoring pengawasan	RT.10/RW.04 Desa Kolidetung Kecamatan Lela	Mengeluarkan surat penegasan hasil monitoring pengawasan insidentil dan Membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Pencemaran Lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging milik Yuslin Rohani, Maria Avilianti Marwiwin, Gregorius Karinus dengan warga Desa Kolidetung Kecamatan Lela

9.	23 April 2024	Surat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan ternak ayam milik Yuslin Rohani	Disling.660.5/173.c/IV/2024 / Penegasan penyampaian hasil monitoring pengawasan	RT.07/RW.03 Desa Kolidetung Kecamatan Lela	Mengeluarkan surat penegasan hasil monitoring pengawasan insidentil dan Membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Pencemaran Lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging milik Yuslin Rohani, Maria Avilianti Marwiwin, Gregorius Karinus dengan warga Desa Kolidetung Kecamatan Lela
10.	26 April 2024	Surat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengambilan Mineral Batuan Tanpa Ijin (PETI) kepada saudara Nikolaus Moa	Disling 660.5/177.a/IV/2024 / Penutupan Aktivitas Penambangan dan Pengambilan Mineral Batuan di Daerah Aliran Sungai Napunseda	Desa Namangkewa Kecamatan Kewapante	Mengeluarkan surat penutupan seluruh aktivitas pengambilan mineral batuan/ galian Golongan C (MINERBA) tanpa izin (PETI) di daerah aliran sungai Napunseda kepada saudara Nikolaus Moa
11.	26 April 2024	Surat penegasan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengambilan Mineral Batuan Tanpa Ijin (PETI) kepada saudara Hermanus Rasong	Disling 660.5/177.a/IV/2024 / Penutupan Aktivitas Penambangan dan Pengambilan Mineral Batuan di Daerah Aliran Sungai Napunseda	Desa Namangkewa Kecamatan Kewapante	Mengeluarkan surat penutupan seluruh aktivitas pengambilan mineral batuan/ galian Golongan C (MINERBA) tanpa izin (PETI) di daerah aliran sungai Napunseda kepada Hermanus Rasong
12.	22 Mei 2024	Surat penegasan terhadap uasaha dan/atau kegiatan penambangan dan pengambilan mineral batuan di Lokasi crossway daerah Aliran sungai Nanga	Disling 660.5/209/V/2024 / Penegasan Penutupan Aktivitas Penambangan dan Pengambilan Mineral Batuan di Losai Crossway Daerah Aliran Sungai Nanga	Desa Korowuwu Kecamatan Lela	Mengeluarkan surat penghentian seluruh aktivitas pengambilan mineral batuan kepada saudara Fransiskus Yohanes Wata, Agustinus Samsulbari Kotten, Edison Yosafata, Febronius Edwin aldrin, Agustinus Keli, Lambertus Sino, Laurensius Mansu, Korfinus Nong Jefri
13.	2 Desember 2024	Surat penegasan untuk pemberhentian aktifitas penambangan dan pengambilan mineral batuan kepada saudara Melkianus Moa	Disling.660.5/645/XII/2024/ Penegasan untuk penghentian Aktifitas Penambangan dan Pengambilan Mineral Batuan	Desa Wairbleler Kecamatan Waigete	Mengeluarkan surat penghentian seluruh aktivitas pengambilan mineral batuan kepada saudara Melkianus Soa
14.	9 Desember 2024	Penghentian Aktivitas Pengambilan Mineral Batuan kepada saudara Goris Kelan, saudara Haji Yusuf dan saudara Ming	Disling.660.5/ 652.a / XII / 2024/ Penegasan untuk penghentian Aktifitas Penambangan dan Pengambilan Mineral Batuan	Kelurahan Nangalimang	Mengeluarkan surat penghentian seluruh aktivitas pengambilan mineral batuan kepada saudara Goris Kelan, saudara Haji Yusuf dan saudara Ming
15.	9 Desember 2024	Surat Bupati Penghentian Aktivitas Pengambilan Mineral Batuan dan Pengurusan Izin kepada saudara Noh Loinati dan saudara Kristo	Disling.660.5/ 652.b / XII / 2024/ Penegasan untuk penghentian Aktifitas Penambangan dan Pengambilan Mineral Batuan	Desa Nelle Lorang dan Desa Gong Bekor	Mengeluarkan surat penghentian seluruh aktivitas pengambilan mineral batuan kepada saudara Noh Loinati / CV. Tiga Putra Sejahtera dan saudara Kristo / CV. Nian Kuwu Aur

Maumere, 31 Desember 2024
Pia Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Akulius, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012

LAMPIRAN 14

PROFIL KEGIATAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
TINGKAT KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024

No	Kategori		Identitas		Profil Kegiatan
1	Perintis Lingkungan Juara I	Nama Alamat Pekerjaan Pendidikan	: : : :	Fransiskus Walo RT.05/RW.02 Desa Kara Kabu Kecamatan Nita Petani SD	Sejak Tahun 1993 sampai sekarang beliau melakukan kegiatan penghijauan di mata air dengan menanam tanaman dengan berbagai jenis pohon seperti kemiri, pinang, advokat, pisang, kakao dan pohon belukar. Penanaman dilakukan di lahan miliknya dengan luas 2 Ha dimana terdapat mata air didalamnya yaitu Mata Air Wair Bubuk. Beliau menanam kembali setelah terjadi longsor saat gempa di Tahun 1992 sehingga menyebabkan debit mata air menurun. Kondisi sekarang dengan adanya penghijauan, debit mata air semakin meningkat dan dimanfaatkan sebagai air minum oleh masyarakat di Desa Nirangkliung Kecamatan Nita, Desa Dobo dan Desa Dobo Nua Puu di Kecamatan Mego.
2	Perintis Lingkungan Juara II	Nama Alamat Pekerjaan Pendidikan	: : : :	Arman Dusun Namandoi RT.012/RW.004 Desa Nangahale Kecamatan Talibura Pelaksana Teknis Kewilayahan Desa Nangahale SMA	Sejak Tahun 2016 sampai sekarang (± 8 Tahun) beliau secara mandiri melakukan kegiatan perlindungan daerah pesisir pantai dengan melakukan pembibitan, penanaman pemeliharaan dan perawatan tanaman mangrove yang dilakukan di RT.016/RW.005 Desa Nangahale Kecamatan Talibura. Pembibitan yang telah dilakukan sebanyak 6.000 anakan, kemudian telah ditanam sebanyak 5.000 anakan dengan luasan ±4 Ha. Media yang digunakan untuk pembibitan menggunakan sampah botol plastik air mineral, dengan demikian dapat mengurangi sampah botol plastik. Kegiatan penanaman dilakukan dengan menyisip diantara tanaman mangrove yang sudah ada untuk menambah ketebalan dan di lokasi yang masih kosong. Dari kegiatan yang dilakukan telah berhasil mengatasi abrasi yang sebelumnya 10 meter dari pantai ke arah pemukiman kemudian turun menjadi 7 meter dan lokasi tersebut dijadikan sebagai tambatan perahu bagi nelayan.

3	Pengabdi Lingkungan Juara I	Nama	:	Emanuel Nong Endy	Sejak Tahun 2013, beliau secara mandiri melakukan kegiatan perlindungan daerah pesisir dengan melakukan penanaman mangrove. Kegiatan tersebut konsisten dilakukan hingga pada Tahun 2015 dengan membentuk Kelompok Teluk Indah dan beliau sebagai Pembina di dalam kelompok. Beliau secara mandiri juga bersama kelompok melakukan pembibitan anakan dan menanam/menambal pada kawasan mangrove yang gundul dengan total luas $\pm$ 70 – 80 Ha. Kegiatan ini berhasil mengurangi terjadinya abrasi. Dengan adanya hutan mangrove yang lebat, menjadikannya sebagai tempat tinggal lebah madu sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diambil madu nya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu juga beliau bersama kelompok melakukan pengawasan terhadap hutan mangrove dan berhasil menindak pelaku pengrusakan dan penebangan mangrove serta pengrusakan karang akibat kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom ikan.
		Alamat	:	Dusun Wairwua RT.002/RW.001 Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura	
		Pekerjaan	:	Petani (Mantan Kepala Desa)	
		Pendidikan	:	SMA	
4	Pengabdi Lingkungan Juara II	Nama	:	Pasifisius Wangge	Beliau melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan terutama dalam upaya pelestarian air yaitu penghijauan sumber mata air di mata air yang telah mengalami penurunan debit mata air bahkan kekeringan. Beliau bergerak secara mandiri sejak Tahun 1998 kemudian bersama dengan Caritas Keuskupan Maumere sejak Tahun 2012 hingga sekarang. Beliau menjadi penggerak/ motivator/ pendamping dalam mengajak masyarakat untuk melakukan penghijauan di 18 sumber mata air di beberapa Desa diantaranya Desa Koro Bhera (Mata Air Ae Wuka dan Loka Po'o) dan Desa Gera (Mata Air Udu Funga, Kobaleke, Bhoka Niku, dan Dage Mude) Kecamatan Mego, Desa Wolorega (Mata Air Ae Kate, Ae Rose, Ae Lowo Ndoko, Keu Kembu, Ladu Wawo, Ae Habo, Olwo Labu, Rongga Rangka, Ae Rau dan Ae Ture) Kecamatan Paga, dan Desa Done (Gomo Fai dan Kobhe Waturia) Kecamatan Magepanda. Selain kegiatan penghijauan juga dilakukan kegiatan pembuatan lubang resapan air hujan. Jenis tanaman yang ditanam yaitu Beringin, Ara, Waru, Dadab, Kaju Ae, Funga, Nggaja, Gau, Tere. Kondisi setelah dilakukan kegiatan yaitu debit mata air perlahan mengalami peningkatan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan budidaya sayur.
		Alamat	:	Jalan Melati I Nomor 28 RT.001/RW.001 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok	
		Pekerjaan	:	Wiraswasta	
		Pendidikan	:	D3 Pertanian	

5	Penyelamat Lingkungan Juara I	Nama Alamat Pekerjaan Pendidikan	: : : :	Kelompok Tani Evata Dusun Kojatada Desa Wuliwutik Kecamatan Nita Petani Sekolah Dasar	Kelompok ini beranggotakan 30 orang yang melibatkan masyarakat Dusun Kojatada Desa Wuliwutik Kecamatan Nita. Kelompok ini sejak Tahun 2003 melakukan kegiatan konservasi berupa penanaman pohon yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan yang berada di kawasan hutan lindung dan diluar kawasan dengan maksud terjaganya fungsi hutan lindung dan kawasan di sekitar hutan lindung. Kondisi Dusun Kojatada berada pada kemiringan lereng dengan topografi dan kemiringannya diatas 18% sehingga kegiatan ini oleh Kelompok Tani Evata disadari menjadi sangat penting untuk menjaga kawasan pertanian dan pemukiman dari bahaya longsor yang dapat mengancam. Jenis anakan yang ditanam antara lain mahoni, jati putih, sengon, pada hamparan seluas ± 20 Ha. Selain menanam, kelompok ini juga melakukan perawatan dan pemeliharaan setiap 3 bulan sekali juga dibantu pengawasan oleh pihak kehutanan. Dengan dilakukannya perawatan dan pemeliharaan secara rutin, 70% jumlah anakan yang ditanam dapat hidup walaupun di lahan yang berbatu. Keberhasilan yang mulai dirasakan masyarakat yaitu banyaknya satwa yang muncul dan bertambahnya debit air serta hampir tidak terjadinya bencana longsor dan banjir. Kelompok Tani Evata ini juga pernah mendapat penghargaan kalpataru di Tahun 2014 pada kategori penyelamat juara 2.
6	Penyelamat Lingkungan Juara II	Nama Alamat Pekerjaan Pendidikan	: : : :	Komunitas Youth Voice Now – Yayasan Litbang, Napung Langir, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Volunteer, Pelajar dan Mahasiswa SMP – SMA – Sarjana	Kelompok ini melakukan kegiatan aksi clean up/pembersihan lingkungan, Aksi Penanaman Pohon, Kampanye Lingkungan, Podcast/ Diskusi Publik melalui media digital, advokasi ke pihak sekolah terkait pengurangan sampah plastik dengan menyarankan kepada siswa/i untuk membawa botol air minum ke sekolah, dan Live In yaitu tinggal dengan masyarakat dan mencari tahu masalah lingkungan yang ada di wilayah tersebut untuk dicari jalan keluar dan mencari solusi terhadap permasalahan lingkungan. Kegiatan ini berlangsung sejak Tahun 2021 – sekarang (±3 tahun). Adapun lokasi kegiatan yang dilakukan yaitu aksi clean up dilakukan di Kelurahan Wuring dan Nangahale, kegiatan Live In di Desa Rubit dan Desa Nangahale, dalam kegiatan live in ini juga dilakukan aksi penanaman pohon, clean up, pemberian edukasi kepada masyarakat dan diskusi bersama masyarakat. Aksi – aksi yang dilakukan secara perlahan telah membawa perubahan terhadap masyarakat.

					Kegiatan edukasi lingkungan, kampanye lingkungan, diskusi public melalui media digital maupun secara langsung tentang lingkungan secara konsisten terus dilakukan oleh kelompok ini dapat mempengaruhi masyarakat luas untuk peduli terhadap lingkungan dan menjaga lingkungan.
7	Pembina Lingkungan Juara I	Nama Alamat Pekerjaan Pendidikan	: : : :	Komunitas Youth Voice Now – Yayasan FREN Litbang, Napung Langir, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Volunteer, Pelajar dan Mahasiswa SMP – SMA – Sarjana	Beliau ditahbiskan menjadi uskup Keuskupan Maumere sejak tanggal 26 September 2018. Di Bulan November 2018 beliau mengeluarkan Surat Gembala yang mengajak umat untuk menjaga dan merawat bumi. Surat gembala ini dikeluarkan setiap 2 kali dalam setahun yaitu menjelang natal dan menjelang paskah. Himbauan terus dilakukan melalui kegiatan SINODE, pastor paroki, umat KBG dan sekolah – sekolah untuk menanam pohon. Beliau juga aktif pada setiap hari – hari besar lingkungan seperti hari bumi, hari air, hari lingkungan hidup dengan melakukan penanaman pohon, penghijauan di sumber mata air. Beliau langsung turun dan mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga diharapkan orang muda yang hadir pada saat kegiatan tersebut untuk dapat menjaga bumi. Beliau juga menghimbau di sekolah – sekolah swasta khususnya dibawah naungan keuskupan untuk terus melakukan aksi – aksi untuk menjaga lingkungan.

Maumere, 31 Desember 2024
Dit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Akulinus, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012

TABEL 3
PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024

NO	TANGGAL	CARA PENYAMPAIAN	MAKSUD/PERIHAL PENGADUAN	LOKASI	PELAKU	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7
1.	5 Januari 2024	Lisan oleh Pj. Desa Wuliwutik mewakili masyarakat RT.018/RW.006 Desa Wuliwutik Kecamatan Nita	Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengambilan minerba di bantaran kali Desa Wuliwutik Kecamatan Nita	RT.018/RW.006 Desa Wuliwutik Kecamatan Nita	Goris Tongkol	- Pemrakarsa / pemilik lahan dilarang melakukan aktivitas pengambilan mineral batuan pada lokasi di maksud dan segera menghentikan segala aktivitas pengambilan - Pemrakarsa wajib melakukan perataan dan perapian kembali bekas pengambilan mineral - Akan dilakukan pertemuan lanjutan penyelesaian sengketa bersama masyarakat dan pemilik lahan untuk mencari solusi dari dampak yang dihasilkan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan - Membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengambilan minerba di RT.018/RW.006 Desa Wuliwutik Kecamatan Nita
2.	8 Januari 2024	Lisan oleh Silvester Noweng (Ketua RT.004 RW.002) Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok	Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan ternak babi di Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok	RT.004/RW.002 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok	Ibu Yustina Alexa/ Sandra Da Cunha	- Menyarankan kepada penanggungjawab usaha agar mengaktifkan kembali septicktank yang ada - Akan dilakukan pertemuan lanjutan penyelesaian sengketa bersama masyarakat dan penanggungjawab usaha untuk mencari solusi dari dampak yang dihasilkan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan - Penanggungjawab usaha segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka terkait pengurusan dokumen lingkungan - Membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Pencemaran Lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan ternak babi milik Ibu Yustina Alexa/ Sandra da Cunha dengan warga RT.004/RW.002 Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok

3.	6 Februari 2024	Lisan dan Tertulis Lurah Wailiti	Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan penebangan tanaman waru disepanjang Pantai Rogasionist di Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat	Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat	Leonard	- Menyarankan kepada Bapak Stefanus dan Bapak Leonard untuk menanam kembali tanaman waru di pesisir pantai - Tanaman Waru yang masih ada tidak boleh ditebang lagi - Menghentikan pembuatan turap lanjutan di pesisir pantai - Membuat sumur resapan komunal agar mengurangi genangan air hujan yang ada akibat banjir rob - Apabila mau menebang pohon harus membuat surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup - Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah terhadap kegiatan penebangan pohon waru RT.027/RW.002 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat
4	7 Februari 2024	Lisan Ketua RT.27 atas nama Paulus Nugi	Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan ternak babi dimana pembuangan kotoran langsung ke laut	Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat	Masyarakat	- Menyarankan kepada penanggung jawab usaha agar membuat septictank atau peresapan sehingga tidak membuang limbah kotoran dari kandang langsung ke laut - Penanggung jawab dilarang melanjutkan aktivitas pemeliharaan ternak babi, sampai dibuatnya septictank - Septictank atau peresapan dibuat agak jauh dari pinggir pantai sehingga proses peresapannya baik - Penanggung jawab usaha segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka terkait pengurusan dokumen lingkungan - Menegaskan kepada pemilik ternak babi untuk tidak membuang kotoran atau limbah dari kandang babi ke laut karena akan menimbulkan pencemaran laut sekitar dan menegaskan untuk memindahkan landang babi ke lokasi lain yang tidak berdekatan dengan pesisir pantai

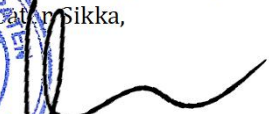
5.	3 April 2024	Lisan dari Sekretaris Desa Kolidetung	Pengaduan adanya lalat di beberapa lokasi usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging	Desa Kolidetung	Maria Avilanti Marwiwin	- Menyarankan kepada pemrakarsa agar tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik terkait usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan - Mengarahkan pemilik ternak ayam untuk secara rutin membersihkan kotoran ayam 2 hari sekali dan menyemprotkan cairan anti lalat - Mengeluarkan Surat Teguran - Menegaskan kepada aparat Desa Kolidetung untuk mengundang semua peternak yang berada di wilayah Desa Kolidetung dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka terhadap pengelolaan lingkungan - Akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan Peternakan Ayam Pedaging bersama masyarakat - Membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Pencemaran Lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging milik Yuslin Rohani, Maria Avilanti Marwiwin, Gregorius Karinus dengan warga Desa Kolidetung Kecamatan Lela
6.	3 April 2024	Lisan dari Sekretaris Desa Kolidetung	Pengaduan adanya lalat di beberapa lokasi usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging	Desa Kolidetung	Yuslin Rohani	- Menyarankan kepada pemrakarsa agar tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik terkait usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan - Mengarahkan pemilik ternak ayam untuk secara rutin membersihkan kotoran ayam 2 hari sekali dan menyemprotkan cairan anti lalat - Mengeluarkan Surat Teguran

						- Menegaskan kepada aparat Desa Kolidetung untuk mengundang semua peternak yang berada diwilayah Desa Kolidetung dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka terhadap pengelolaan lingkungan - Akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan Peternakan Ayam Pedaging bersama masyarakat - Membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Pencemaran Lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging milik Yuslin Rohani, Maria Avilianti Marwiwin, Gregorius Karinus dengan warga Desa Kolidetung Kecamatan Lela
7.	3 April 2024	Lisan dari Sekretaris Desa Kolidetung	Pengaduan adanya lalat di beberapa lokasi usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging	Desa Kolidetung	Gregorius Karinus	- Menyarankan kepada pemrakarsa agar tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik terkait usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan - Mengeluarkan Surat Teguran kepada Gregorius Karinus - Menegaskan kepada aparat Desa Kolidetung untuk mengundang semua peternak yang berada diwilayah Desa Kolidetung dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka terhadap pengelolaan lingkungan - Membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Pencemaran Lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging milik Yuslin Rohani, Maria Avilianti Marwiwin, Gregorius Karinus dengan warga Desa Kolidetung Kecamatan Lela
8.	3 April 2024	Lisan dari Sekretaris Desa Kolidetung	Pengaduan adanya lalat di beberapa lokasi usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging	Desa Kolidetung	Martha Herlina	- Saat melakukan pengawasan dan pemantauan di lokasi usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging untuk sementara tidak beroperasi karena belum ada ayam yang masuk

						- Tetap melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik - Membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Pencemaran Lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan ternak ayam pedaging milik Yuslin Rohani, Maria Avilianti Marwiwin, Gregorius Karinus dengan warga Desa Kolidetung Kecamatan Lela
9.	30 Mei 2024	Lisan dari Yanto Liwu	Pengaduan terhadap bau yang tidak sedap yang diduga berasal dari pembuangan wc dari aktivitas usaha dan/atau kegiatan kos-kosan	Kompleks Karmel Waiklau RT.002/RW.010 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok	Geradus Mayela	- Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar usaha kos – kosan - Menutup lubang – lubang kecil yang berada di pinggir dinding kamar wc - Membuat saluran pembuangan dari kamar mandi, agar limbah tidak berceceran - Menyiapkan tempat pembuangan sampah
10.	7 Agustus 2024	Lisan dari Fery	Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan ternak babi dimana septicktanknya sudah penuh yang menimbulkan bau	Desa Hoder	Baba Lincung / Martin Lomi	- Segera mengurus Dokumen Lingkungan dan Rekomendasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka - Menutup saluran pembuangan yang terbuka menggunakan seng, agar dapat dibuka dan ditutup untuk dilakukan pembersihan - Menambah bak pembuangan baru untuk pembuangan limbah cair limpasan dari bak utama dan menambahkan dengan ijuk dan bata didalam bak dan disekitar bak sebagai peresap agar tidak timbul genangan air yang dapat menyebabkan bau
11.	12 Agustus 2024	Lisan dari Lorensius Sesu (Kades Tanarawa)	Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan pengambilan minerba di Daerah Aliran Sungai (DAS) Liwun Wulun Desa Tanarawa	Desa Tanarawa	PT. Nusa Tenggara Jaya	- Menyarankan kepada Aparat Pemerintah Desa Tanarawa untuk menyampaikan kepada penanggungjawab PT. NTJ untuk merapikan kembali jalur air di DAS Liwun Wulun dan menutup jalan masuk ke lokasi sehingga tidak ada lagi kegiatan pengambilan minerba di lokasi tersebut

12.	12 September 2024	Tertulis dari Plt. Lurah Hewuli	Pengaduan terhadap pemanfaatan sepadan pantai oleh PT Fajar Flores Flamboyan Fishindo	RT.012 / RW.004 Kelurahan Hewuli	PT. Fajar Flores Flamboyan Fishindo	- Perlu dilakukan diskusi bersama masyarakat yang memanfaatkan Pelabuhan ikan milik PT F4 untuk merapikan tali agar hal tersebut tidak terjadi lagi
13.	12 September 2024	Tertulis dari Pj. Kepala Desa Wuliwutik	Pemberitahuan pemberhentian aktivitas pembakaran arang	RT.018/RW.004 Dusun Lirikelen Desa Wuliwutik	CV. Sido Makmur Abadi	- Penanggungjawab usaha perlu melakukan pembaharuan Dokumen Lingkungan - Pihak Desa dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan yang ada
14	14 November 2024	Lisan dari Silianus Silvester	Adanya bau yang ditimbulkan dari limbah usaha dan/ atau kegiatan Mixue dan adanya sampah di sakluran drainase	RT.010 / RW.003 Kelurahan Waioti	Pemilik Mixue	- Mengurus izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup - Tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar usaha mixue - Membuat resapan sebelum limbah cair dibuang ke drainase kota - Membersihkan saluran drainase secara rutin agar tidak terdapat sampah - Menyiapkan tempat pembuangan sampah
15	9 Desember 2024	Lisan dari Kapolsek Nele	Adanya pengambilan Minerba di Nele Lorang	Di Desa Nele Lorang	CV. Tiga Putra CV. Nian Kuwu	- Pemrakarsa /Pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas pengambilan mineral batuan pada lokasi dimaksud dan segera menghentikan segala aktivitas pengambilan mineral batuan - Pemrakarsa wajib melakukan perataan dan perapian kembali bekas pengambilan mineral - Dikeluarkannya surat penghentian aktivitas pengambilan mineral batuan dan pengurusan izin oleh Bupati Sikka

16	16 Desember 2024	Tertulis dari Komunitas warga terdampak pembakaran limbah B3 RSUD. T.C. Hillers Maumere	Adanya pengaduan pembakaran limbah B3 oleh RSUD. T.C.Hillers Maumee	RSUD. T.C.Hillers Maumere	Petugas RSUD. T.C.Hillers Maumere	- Karena tumpukan limbah padat B3 di Rumah Sakit sudah mencapai 12 ton per tanggal 19 Desember 2024 sehingga disarankan dilakukan pembakaran 3x . 1 kali siang, 1x sore dan 1x malam dengan catatan sampah medis dalam kondisi kering
17	19 Desember 2024	Lisan dari Kepala Desa Wairbleler	Adanya pengambilan minerba di Desa Wairbleler	Desa Wairbleler	Melkianus Soka	- Pemrakarsa /Pelaku usaha dilarang melakukan aktivitas pengambilan mineral batuan pada lokasi dimaksud dan segera menghentikan segala aktivitas pengambilan mineral batuan - Pemrakarsa wajib melakukan perataan dan perapian kembali bekas pengambilan mineral - Dikeluarkannya surat penegasan untuk aktivitas penambangan dan pengambilan mineral batuan oleh Dinas ingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Maumere, 31 Desember 2024
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka,

Akulima S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680424 198903 1 012





PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Jendral Sudirman No. 94 Maumere, 86111 NTT
Telp. (0382) 21348 Faks. (0382) 22824
Email: dinaslingkunganhidupsikka@gmail.com

**Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Tahun 2024**

No.	Wilayah/Lokasi	Truck Sampah	Amrol	Roda 3	TPS Kontener	TPS Permanen
1.	Kec. Alok	2 unit	1 unit	2 unit	15 unit	20 unit
	Kel. Madawat			2 unit	6 unit	13 unit
	Kel. Kabor				2 unit	4 unit
	Kel. Kota Uneng				5 unit	3 unit
	Kel. Nangalimang				2 unit	-
2.	Kec. Alok Timur	2 unit	1 unit	2 unit	12 unit	24 unit
	Kel. Kota Baru			1 unit	3 unit	11 unit
	Kel. Beru				2 unit	1 unit
	Kel. Wairotang				1 unit	3 unit
	Kel. Waioti			1 unit	3 unit	5 unit
	Kel. Nangameting				3 unit	4 unit
3.	Kec. Alok Barat		1 unit		3 unit	1 unit
	Kel. Wolomarang				1 Unit	1 unit
	Kel. Wuring				2 unit	-
	Kel. Wailiti				-	-
4.	Kec. Kangae					
	Desa Lanngir	-	-	-	-	-
	Desa Tana Duen	-	-	-	-	-
5.	Kec. Kewapante	-	-		1 Unit	3 Unit
	Desa Geliting				-	-
	Desa Wair Koja				1 unit	3 unit
6.	Ledalero				1 Unit	
	Jumlah	4 unit	3 unit	4 unit	32 unit	48 unit

Daftar Sarana Prasarana Penanganan Sampah di TPA

No	Nama	Alamat	Luas	Sistim Pengolahan	Fasilitas
1.	TPA Wairii	Wairii Desa Kolisia Kecamatan Magepanda	±5 Ha	Cantrol Lendfill	1 Unit Dozer 1 Unit Excavator

DOKUMENTASI
PEMBANGUNAN PATUNG FRANS SEDA
TAHUN 2024

Lokasi	: Taman Adi Sucipto, Jl. Adi Sucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka
Sumber Dana	: Coorporate Social Responsibility (CSR) Bank NTT Tahun 2024
Besar Dana	: Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
Masa Pelaksanaan	: 43 hari terhitung 19 November – 30 Desember 2024
Masa Pemeliharaan	: 180 hari terhitung 20 Desember 2024 – 17 Juni 2025





Sumber : Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup (November - Desember 2024)

Lampiran Surat Pj. Bupati Sikka

Nomor : Disling.660.1/ 29 /I//2025

Perihal : Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana CSR Bank NTT

**RINCIAN PEMANFAATAN DANA CSR
BANK NTT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
CQ. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIKKA
(PEMBANGUNAN PATUNG FRANS SEDA)
DI JL. ADI SUCIPTO, KELURAHAN WAIOTI, KECAMATAN ALOK TIMUR
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2024**

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
A.	PERENCANAAN				
I	BIAYA LANGSUNG PERSONEL				
1	Team Leader D III, Arsitektur	OB	1	1.500.000	1.500.000
2	CAD Operator/ Draftman (1 orang)	OB	1	850.000	850.000
3	Surveyor	OB	1	650.000	650.000
II	BIAYA LANGSUNG NON -PERSONEL				
1	Alat Tulis Kantor	Paket	1	150.000	150.000
2	Sewa Kendaraan Roda Dua	Unit	1	150.000	150.000
3	Survey dan Investigasi	LS	1	250.000	250.000
4	Sewa Peralatan Kerja	LS	1	150.000	150.000
5	Sewa Kantor	LS	1	250.000	250.000
6	Penggandaan	LS	1	250.000	250.000
7	Dokumentasi	LS	1	150.000	150.000
				Jumlah	4.350.000
				PPN 11 %	478.500
				Jumlah A	Rp 4.828.500
B.	KONSTRUKSI				
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pembersihan Lokasi Pekerjaan Awal dan Akhir	ls	1	500,000	500,000
2	Papan Nama Proyek	ls	1	200,000	200,000
3	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	ls	1	500,000	500,000
4	Penutup Area Kerja	ls	1	900,000	900,000
5	Penyediaan Air & Listrik Kerja	ls	1	500,000	500,000
6	Penyelenggaraan K3	ls	1	700,000	700,000
7	Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan	ls	1	700,000	700,000

II	PEMBANGUNAN TUGU PATUNG				
	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1	Galian Tanah Pondasi	M	3,33	61.000	203.130
2	Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	M	1,66	45.000	74.700
3	Urugan Pasir Dibawah Lantai	M	3,47	219.000	759.930
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1	Pek. Pasangan bata	M	10,4	135.400	1.402.744
2	Pek. Profil Tatakan Patung Camp. 1 Pc 5 Psr	ls	1	1.900.000	1.900.000
3	Acian Profil Tatakan Patung	M	6,2	34.100	211.420
4	Plesteran Tatakan Patung 1 pc 5 psr	M	4,26	44.050	187.653
5	Pasangan Batu Alam Pada Bidang Tatakan Patung	M	4,26	377.700	1.609.002
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Cor Beton Kolom (K-250) 80/80 Camp. 1 Pc 2 Psr 3 Krl	M	1,63	1.324.050	2.158.202
2	Cor Beton Footplat 160/160 (K-250) Camp. 1 Pc 2 Psr 3 Krl	M	0,77	1.324.050	1.019.519
V	PEKERJAAN PEMBESIAN				
1	Pek. Pembesian Kolom 80X80	Kg	92,3	18.629	1.718.712
2	Pek. Pembesian Footplat 160/160	Kg	80,1	18.629	1.492.742
VI	PEKERJAAN BEKISTING & PERANCAH				
1	Cor Beton Footplat 160/160	M	1,92	369.781	709.980
2	Cor Beton Kolom 80/80	M	8,8	369.781	3.254.073
3	Pengadaan Perancah	Ls	1	900.000	900.000
VII	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI & DINDING				
1	Pek. Rabat Lantai T= 5 cm Camp. 1 Pc 3 Psr 5 Krl	M	1,73	1.162.600	2.011.298
2	Pek. Lantai Keramik 40x40 cm 1 Unpolished	M	34,7	229.451	7.955.066
VII I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pasang Meteran 1300 Watt	Ls	1	4.000.000	4.000.000
2	Pasang Panel Box 30 X50	Lot	1	700.000	700.000
3	MCB 1 Fassa 6A + Kotak MCB Presto & Grouping	Bh	1	210.000	210.000
4	Kabel Instalasi Outdoor NYM Eternal 3 x 2,5 mm dari tiang lampu jalan	M	32,5	28.500	926.820
5	Instalasi Listrik	Titik	12	250.000	3.000.000
6	Lampu Taman Pake Tiang tinggi 2 m (custom) 15watt	Bh	7	560.000	3.920.000
7	Lampu LED Spot Light Warm White (lampu tembak / sorot)24 watt	Bh	4	650.000	2.600.000
IX	PEKERJAAN PENGADAAN				
1	Pengadaan Patung Perunggu 1/2 badan Frans Seda (tinggi 1,5)	Bh	1	115.500.000	115.500.000
2	Pengadaan Tanaman (bunga perdu rendah)	Bh	10	77.000	770.000

3	Pengadaan Prasasti 40 x 60 cm	Bh	1	1.150.000	1.150.000
4	Pengadaan Logo Bank NTT Acrylic	Bh	2	950.000	1.900.000
5	Pengadaan Letter Text Acrylic (Tugu Frans Seda)	Set	1	1.100.000	1.100.000
X	PEKERJAAN PENGECATAN & FINISHING				
1	Pekerjaan Cat Tembok ex Nippon Paint (2 lapis)	M	22,1	28.519	629.129
2	Pekerjaaan Cat Profil Tatakan Patung	M	6,2	28.519	176.818
				Jumlah	168.150.936
				PPN 11%	18.496.603
				Jumlah B	Rp 186.647.539
C.	PENGAWASAN				
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONEL				
1	Inspectore	LS	1	3.500.000	3.500.000
2	Administrator/Operator Komputer	LS	1	1.500.000	1.500.000
II	BIAYA LANGSUNG NON-PERSONEL				
1	Sewa Kendaraan Roda 2	LS	1	250.000	250.000
2	Perlengkapan ATK	LS	1	550.000	550.000
3	Biaya Pelaporan (Mingguan, Bulanan, Akhir)	LS	1	825.000	825.000
				Jumlah	6.625.000
				PPN 11%	728.750
				Jumlah C	Rp 7.353.750
				TOTAL A+B+C	Rp 198.829.789

Pj. BUPATI SIKKA

ADRIANUS FIRMINUS PARERA